

**561 / Ekonomi Pembangunan**

**LAPORAN AKHIR  
PENELITIAN HIBAH BERSAING**



**ANALISIS *BENEFIT INCIDENCE ANALYSIS* PROGRAM BIDIKMISI  
DI PERGURUAN TINGGI DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Aula Ahmad Hafidh Saiful Fikri, M. Si. / NIDN.0028107506  
Tejo Nurseto, M. Pd. / NIDN. 0024037404  
Ngadiyono, S.Pd. / NIDN. 0029107005**

Dibiayai oleh :  
Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian  
Nomor: 033/APBH-BOPTN/UN34.21/2013, tanggal 18 Juni 2013

**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
Nopember 2013**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Kegiatan : ANALISIS BENEFIT INCIDENCE ANALYSIS PROGRAM BIDIK  
MISI  
DI PERGURUAN TINGGI DI PROVINSI DI YOGYAKARTA

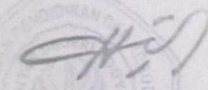
Peneliti / Pelaksana  
Nama Lengkap : AULA AHMAD HAFIDH SAIFUL FIKRI M.Si  
NIDN : 0028107506  
Jabatan Fungsional :  
Program Studi : Manajemen  
Nomor HP : 081904291102  
Surel (e-mail) : aulaghina@gmail.com

Anggota Peneliti (1)  
Nama Lengkap : TEJO NURSETO M.Pd.  
NIDN : 0024037404  
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Anggota Peneliti (2)  
Nama Lengkap : NGADIYONO  
NIDN : 0029107005  
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

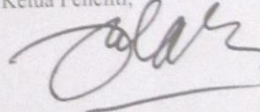
Institusi Mitra (jika ada)  
Nama Institusi Mitra :  
Alamat :  
Penanggung Jawab :  
Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 1 dari rencana 2 tahun  
Biaya Tahun Berjalan : Rp. 45.000.000,00  
Biaya Keseluruhan : Rp. 150.000.000,00

Mengetahui  
Dekan FE UNY

  
(Dr. Sugiharsono, M. Si.)

NIP/NIK 195503281983031002


Yogyakarta, 27 - 11 - 2013,  
Ketua Peneliti,



(AULA AHMAD HAFIDH SAIFUL FIKRI  
M.Si)

NIP/NIK 197510282005011002

Menyetujui,  
Ketua LPPM UNY

  
(Prof. Dr. Anik Ghufron)  
NIP/NIK 196211111988031001

## **PRAKATA**

Alhamdulillah, tim peneliti ucapkan atas terselesaikannya penelitian hibah bersaing yang berjudul *Analisis Benefit Incidence Analysis Program Bidikmisi Di Perguruan Tinggi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Penelitian ini bermaksud untuk memberikan evaluasi mengenai bidikmisi apakah tepat sasaran dan mempunyai manfaat bagi pendidikan tinggi mahasiswa yang secara ekonomi kurang mampu.

Dalam proses penyusunan instrumen, pengumpulan data (pencarian responden) dan input serta analisis data, tim peneliti mengucapkan terima kasih yang dalam atas kerjasama dan hubungan yang baik. Tim peneliti khusus memberikan apresiasi kepada mahasiswa yang ikut terlibat terutama dalam pengumpulan data, mencari mahasiswa bidikmisi di lapangan merupakan usaha dan dedikasi yang luar biasa.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, maka pada kesempatan ini penulis mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan dari segenap pembaca. Akhir kata penulis do'a kan semoga semua amal yang diberikan mendapat imbalan dari Allah SWT, dan semoga penelitian ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamiin.

Hormat Kami,

Tim Peneliti

# DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN PENGESAHAN

RINGKASAN

PRAKATA

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR ISI

ABSTRAK

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
	A. Latar Belakang Permasalahan	1
	B. Perumusan Masalah	4
	C. Tujuan Penelitian	5
	D. Keutamaan Penelitian	5
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN PUSTAKA</b>	<b>6</b>
	A. Teori Pengeluaran Pemerintah	6
	1. Pengeluaran Pemerintah Secara Mikro	6
	2. Pengeluaran Pemerintah Secara Makro	6
	3. Klasifikasi Pengeluaran Pemerintah	8
	B. Pembayaran Transfer	8
	C. Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan	9
	1. Gambaran Umum Program Bidikmisi	10
	D. Distribusi Pendapatan	14
	E. Teori Pembagian Manfaat ( <i>benefit incidence theory</i> )	15
	F. Kerangka Berfikir	17
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	<b>20</b>
	A. Desain Penelitian	20
	B. Definisi Operasional Variabel	20
	C. Populasi dan Sampel	21

	1. Populasi	21
	2. Sampel	21
	D. Alat Analisis	23
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	<b>27</b>
	A. DESKRIPSI DATA PENELITIAN	27
	1. Karakteristik responden berdasarkan status perguruan tinggi	27
	2. Karakteristik responden berdasarkan perguruan tinggi asal	28
	3. Karakteristik responden berdasarkan angkatan	30
	4. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin	31
	B. LATAR BELAKANG SOSIAL DAN EKONOMI	32
	1. Asal tempat tinggal	32
	2. Jenis pekerjaan orangtua	33
	3. Rata-rata pendapatan orangtua	34
	4. Jumlah tanggungan orangtua	36
	5. Kepemilikan asset	37
	6. Jenis kepemilikan asset	38
	C. INFORMASI PROGRAM BIDIKMISI	39
	1. Informasi mengenai bidikmisi	39
	2. Proses pengajuan	40
	3. Cara pengajuan	41
	4. Biaya pengurusan	42
	5. Survey tempat tinggal	43
	D. DESKRIPSI PEMANFAATAN BANTUAN	44
	1. Alokasi pemanfaatan bantuan biaya hidup	45
	2. Tempat tinggal di Yogyakarta	46
	3. Moda transportasi ke kampus	47
	E. BENEFIT INCIDENCE ANALYSIS	49
	F. KINERJA AKADEMIK	52
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b>	<b>54</b>
	A. Kesimpulan	54
	B. Saran – Saran	54

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rasio dan jumlah pengeluaran pendidikan terhadap APBN	2
Tabel 2. Karakteristik responden berdasarkan status perguruan tinggi	28
Tabel 3. Karakteristik responden berdasarkan perguruan tinggi asal	29
Tabel 4. Karakteristik responden berdasarkan angkatan	30
Tabel 5. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin	31
Tabel 6. Asal tempat tinggal	32
Tabel 7. Jenis pekerjaan orangtua	33
Tabel 8. Rata-rata pendapatan orangtua	34
Tabel 9. Jumlah tanggungan orangtua	36
Tabel 10. Kepemilikan asset	37
Tabel 11. Jenis kepemilikan asset	37
Tabel 12. Cara pemenuhan kebutuhan	39
Tabel 13. Sumber informasi bidikmisi	40
Tabel 14. Proses pengajuan	41
Tabel 15. Cara pengajuan	42
Tabel 16. Biaya pengurusan	42
Tabel 17. Survey tempat tinggal	43
Tabel 18. Alokasi pemanfaatan bantuan	45
Tabel 19. Tempat tinggal di Yogyakarta	46
Tabel 20. Moda transportasi ke kampus	47
Tabel 21. Kuintil benefit incidence	49
Tabel 22. Jumlah SKS yang ditempuh	52

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kurva Lorenz	15
Gambar 2. Hubungan pengeluaran pemerintah dengan hasil yang akan dicapai	16
Gambar 3. Kerangka berfikir	19
Gambar 4. Kurva Lorenz dan kurva konsentrasi	25
Gambar 5. Persentase responden berdasarkan status perguruan tinggi	28
Gambar 6. Persentase responden berdasarkan perguruan tinggi asal	29
Gambar 7. Persentase responden berdasarkan angkatan	30
Gambar 8. Persentase responden berdasarkan jenis kelamin	31
Gambar 9. Persentase asal tempat tinggal	33
Gambar 10. Persentase jenis pekerjaan orangtua	34
Gambar 11. Persentase pendapatan orangtua	35
Gambar 12. Persentase tanggungan pendidikan orangtua	36
Gambar 13. Persentase kepemilikan asset	37
Gambar 14. Persentase jenis kepemilikan asset	38
Gambar 15. Persentase cara pemenuhan kebutuhan	39
Gambar 16. Persentase sumber informasi bidikmisi	40
Gambar 17. Persentase proses pengajuan	41
Gambar 18. Persentase cara pengajuan	42
Gambar 19. Persentase biaya pengurusan	43
Gambar 20. Persentase survey tempat tinggal	44
Gambar 21. Persentase alokasi pemanfaatan bantuan bidikmisi	46
Gambar 22. Persentase tempat tinggal di Yogyakarta	47
Gambar 23. Persentase moda transportasi ke kampus	49

Gambar 24. Kuintil benefit incidence	51
Gambar 25. Kurva Lorenz bidikmisi	52
Gambar 26. Indeks Prestasi Kumulatif	53



## ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan memberikan penilaian terhadap program Bidikmisi pada perguruan tinggi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode analisis yang digunakan adalah metode *Benefit Incidence Analysis*. Metode ini menunjukkan distribusi dari pengeluaran publik yang dilakukan oleh pemerintah ke dalam grup-grup masyarakat yang berbeda berdasarkan pendapatannya, sehingga diharapkan dapat menjelaskan progresifitas pada kebijakan Program Bidikmisi yang diberikan kepada mahasiswa kurang mampu secara ekonomi namun mampu secara akademis. Pengumpulan data dalam penelitian menggunakan metode survey melalui kuesioner yang dibagikan kepada mahasiswa yang menjadi sampel. Sampel meliputi mahasiswa penerima Bidikmisi dari berbagai perguruan tinggi baik swasta maupun negeri.

Dari hasil penelitian diperoleh responden sebanyak 96 mahasiswa, dimana sebagian besar merupakan mahasiswa yang berasal dari keluarga yang tidak mampu. Dalam analisis pembagian manfaat, mahasiswa tersebut (82 persen) memperoleh manfaat yang lebih besar dari program Bidikmisi. Apabila rata-rata pendapatan gabungan maksimal Rp.3.000.000 sebagaimana ketentuan program maka sebesar 92 persen masyarakat merasakan manfaat dari program Bidikmisi. Dengan demikian program Bidikmisi merupakan kebijakan pemerintah yang *propoor* dan bersifat progresif. Program tersebut sebaiknya dipertahankan dan diperluas sasarannya agar partisipasi pendidikan tinggi menjadi meningkat terutama bagi masyarakat tidak mampu.

*Kata Kunci* : Program Bidikmisi, *benefit incidence analysis*, progresif

## ABSTRACT

This research was conducted to analyze and provide an assessment of the Bidikmisi program at colleges in the province of Daerah Istimewa Yogyakarta. Method of analysis used is the method of Benefit Incidence Analysis. This method shows the distribution of public expenditure carried out by the government into groups different communities based on its revenues, so hopefully can explain progressivity of Bidikmisi program given to economically underprivileged students but academically capable. The collection of data in research using the method of survey through questionnaires distributed to students who become samples. The sample includes a student recipient of Bidikmisi from various colleges both private as well as the public.

Of research results obtained by the respondent as much as 96 students, where most of the students come from families that cannot afford of higher education. In the analysis of the benefits, students were ( 82 percent ) accept greater benefit from Bidikmisi program. If the average income joint maximum Rp.3.000.000 as the provisions program hence of 92 percent of people feel benefits from Bidikmisi program. Thus Bidikmisi program is government policy that propoor factor and progressive. The program should retained and expanded the targets to participation of higher education become inflated especially for poor people.

*Key words* : Bidikmisi program, benefit incidence analysis, progressive

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN**

Sesuai dengan UU Nomor 20/2003 tentang sistem pendidikan nasional, disebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Untuk warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Demikian pula warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. Selain itu, penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah juga mengacu pada Pasal 31 ayat 1 dan 2 UUD 1945, yang ayat-ayat tersebut masing- masing berbunyi:

1. Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.
2. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan pasal tersebut, maka pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, dan masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu diperlukan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak mendapatkan bantuan biaya pendidikan bagi mereka yang memiliki potensi akademik baik dan tidak mampu secara ekonomi serta berhak mendapatkan beasiswa bagi mereka yang berprestasi.

**Tabel 1. Rasio dan Jumlah pengeluaran pendidikan terhadap APBN**

Tahun	Pengeluaran pendidikan	% APBN	Belanja Negara
2005	25.987.390.636	6,5	397.800.000.000
2006	43.287.400.000	6,7	647.667.800.000
2007	54.067.100.000	7,1	763.570.800.000
2008	64.029.169.200	7,5	854.660.100.000
2009	89.918.100.000	8,7	1.037.100.000.000
2010	84.086.500.000	8,0	1.051.100.000.000

Sumber: Nota Keuangan dan APBN 2010

Pada tabel diatas dapat kita lihat bahwa pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan masih rendah apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan pemerintah untuk dapat menyelenggarakan pendidikan nasional dengan optimal. Pada tahun 2005, proporsi pengeluaran pemerintah bidang pendidikan terhadap belanja negara hanya sebesar 6,5%. Proporsi pengeluaran pemerintah bidang pendidikan untuk tahun 2006 sampai 2008 secara berurutan adalah sebesar 6,7%, 7,1%, dan 7,5%. Pada tahun 2009 terjadi peningkatan yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya hingga mencapai 1,2% yaitu menjadi sebesar 8,7%. Pada tahun 2010 mengalami penurunan dalam jumlah maupun proporsi pengeluaran pemerintah atas pendidikan, yaitu Rp 84.086.500.000.000 atau sebesar 8,0% dari total belanja negara.

Peningkatan pemerataan akses jenjang perguruan tinggi sampai saat ini masih merupakan masalah di negara kita yang tercermin dari Angka Partisipasi Kasar (APK) yang baru mencapai 27,1% dan angka tingkat melanjutkan ke perguruan tinggi masih rendah dibandingkan dengan negara berkembang pada umumnya. Dengan demikian masih cukup banyak lulusan jenjang pendidikan menengah yang tidak dapat melanjutkan ke perguruan tinggi termasuk mereka yang berpotensi akademik baik dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Selain itu peningkatan akses terhadap informasi dan sumber pendanaan juga relatif terbatas.

Berbagai jenis beasiswa dan atau bantuan biaya pendidikan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun dari dunia usaha atau industri telah diluncurkan. Akan tetapi bantuan yang diberikan relatif belum dapat memenuhi kebutuhan studi, jumlah sasaran dan belum menjamin keberlangsungan studi mahasiswa hingga selesai. Berbagai usaha telah dilakukan pemerintah untuk memajukan pendidikan di Indonesia, salah satunya adalah lewat program Beasiswa Pembinaan dan Pendidikan Mahasiswa Miskin Berprestasi(Bidikmisi). Namun, dewasa ini Bidikmisi dinilai tak tepat sasaran dan merata. Pasalnya, program yang sejatinya diperuntukkan mahasiswa miskin berprestasi, namun kenyataannya salah sasaran serta pembagiannya tidak adil antara perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS).

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan Nasional pada tahun 2010 meluncurkan program bantuan biaya pendidikan Bidikmisi berupa bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan dan bantuan biaya hidup kepada 20.000 mahasiswa yang memiliki potensi akademik baik dan tidak mampu secara ekonomi yang diselenggarakan di 104 perguruan tinggi negeri. Program ini merupakan salah satu program 100 Hari Kerja Menteri Pendidikan Nasional pada tahun 2009. Perguruan tinggi penyelenggara program Bidikmisi adalah perguruan tinggi di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama. Pada tahun 2011 mahasiswa baru penerima Bidikmisi bertambah sebanyak 30.000 di 117 perguruan tinggi negeri dan pada tahun 2012 bertambah lagi sebanyak 42.000 mahasiswa termasuk 2.000 mahasiswa perguruan tinggi swasta.

Pada tahun 2013 akan dilanjutkan dengan menerima 50.000 calon mahasiswa penerima Bidikmisi yang diselenggarakan di 95 perguruan tinggi negeri dibawah Kemdikbud dan beberapa PTS yang akan diseleksi. Pada tahun ini sebanyak 1767

mahasiswa penerima Bidikmisi dari jenjang D3 angkatan 2010 diharapkan akan menyelesaikan studi.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Permasalahan yang muncul mengenai pemberian bantuan keuangan terutama beasiswa baik pada taraf institusi maupun pada tingkat penerima (mahasiswa) sangat beragam, mulai dari asal dana hingga pengalokasiannya. Secara umum masalah yang muncul adalah kurangnya ketercakupannya mahasiswa miskin dalam merasakan adanya program bidikmisi tersebut adalah ketidaksesuaian penggunaan dana dengan aturan yang berlaku serta substansi bidikmisi sebagai subsidi pendidikan. Subsidi merupakan alokasi yang diberikan pemerintah pada masyarakat kurang mampu, namun bidikmisi diberikan secara merata sesuai dengan alokasi mahasiswa dalam perguruan tinggi.

Berdasarkan permasalahan seputar dana bidikmisi tersebut maka penelitian mengangkat masalah seputar ketercakupannya dana bidikmisi terhadap akses mahasiswa dalam menikmati fasilitas pendidikan tinggi khususnya bagi mahasiswa yang tidak mampu yang merupakan sasaran utama dari program tersebut serta sejauh mana dampak yang diberikan oleh program tersebut terhadap institusi, mahasiswa dan orang tua siswa.

Rumusan masalah yang dapat diambil dari latar belakang dan identifikasi masalah diatas adalah :

1. Bagaimana pola penyaluran dana program bidikmisi yang ada di perguruan tinggi di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?.
2. Apakah program bidikmisi termasuk sebuah kebijakan yang progresif?.
3. Bagaimana pemerintah, perguruan tinggi, mahasiswa dan masyarakat berperan serta dalam program bidikmisi?.

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan umum dari penelitian mengenai program bidikmisi adalah untuk mengumpulkan informasi terkait dengan pelaksanaan program tersebut. Bidikmisi merupakan salah satu bentuk dari subsidi. Sedangkan tujuan khusus penelitian ini adalah :

1. Menganalisis pola pembagian manfaat Bidikmisi terhadap penerimanya di perguruan tinggi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Melihat progresifitas dari Program Bidikmisi di perguruan tinggi di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Memberikan saran kepada pemerintah, perguruan tinggi dan masyarakat dalam rangka memaksimalkan peran sertanya dalam pelaksanaan Program Bidikmisi.

### **D. KEUTAMAAN PENELITIAN**

Penelitian ini sangat penting untuk menilai kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan terutama program bidikmisi bagi mahasiswa di perguruan tinggi. Suatu kebijakan seharusnya diberikan penilaian kinerja sejauh mana program-program yang direncanakan sesuai dengan tujuan. Penelitian mengenai program bidikmisi belum pernah dilakukan sebagaimana program pemerintah yang serupa seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang telah banyak diteliti dan dikaji.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. TEORI PENGELUARAN PEMERINTAH**

##### **1. Pengeluaran Pemerintah Secara Mikro**

Secara mikroekonomi, teori mengenai pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Jumlah barang publik tersebut dipengaruhi oleh interaksi antara permintaan dan penawaran barang publik melalui anggaran belanja. Jumlah barang publik yang akan disediakan tersebut akan menimbulkan permintaan akan barang lain khususnya disektor swasta. Menurut Guritno (1993), perkembangan pengeluaran pemerintah secara mikro dapat dijelaskan dengan beberapa faktor dibawah ini:

1. Perubahan permintaan akan barang publik.
2. Perubahan dari aktivitas pemerintah dalam menghasilkan barang publik, dan juga perubahan dari kombinasi faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi.
3. Perubahan kualitas barang publik.
4. Perubahan harga-harga faktor-faktor produksi.

##### **2. Pengeluaran Pemerintah Secara Makro**

Dalam teori makroekonomi, Dumairy (1996) menyatakan bahwa identitas keseimbangan pendapatan nasional merupakan relevansi campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Kenaikan atau penurunan pengeluaran pemerintah akan merubah pendapatan nasional. Banyak pertimbangan yang mendasari pengambilan keputusan pemerintah dalam mengatur pengeluarannya. Pemerintah tidak cukup hanya meraih tujuan akhir dari setiap kebijaksanaan pengeluarannya, tetapi juga harus



memperhitungkan sasaran yang akan menikmati atau terkena kebijaksanaan tersebut. Memperbesar pengeluaran dengan tujuan semata-mata untuk meningkatkan pendapatan nasional atau memperluas kesempatan kerja tidaklah cukup, tetapi harus diperhitungkan siapa atau masyarakat lapisan mana yang akan meningkatkan pendapatannya atau kesejahteraannya. Pemerintah pun perlu menghindari agar peningkatan perannya dalam perekonomian tidak melemahkan kegiatan pihak swasta.

Dari sisi makroekonomi, Guritno (1993) menyebutkan beberapa teori mengenai pengeluaran pemerintah yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi. Rostow dan Musgrave menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan menjadi beberapa tahap, yaitu tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, presentasi pemerintah terhadap total investasi sangat besar karena pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi, dan lain sebagainya. Pada tahap menengah, investasi pemerintah tetap diperlukan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin membesar. Dengan membesarnya investasi swasta maka peranan pemerintah sangat dibutuhkan karena peranan swasta yang semakin membesar dapat menyebabkan kegagalan pasar. Hal ini juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak dan kualitas yang lebih baik. Selain itu pada tahap ini perkembangan ekonomi menyebabkan terjadinya hubungan antar sektor yang semakin rumit. Pada tingkat ekonomi yang lebih lanjut, Rostow mengatakan bahwa pembangunan ekonomi dan aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti halnya program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat, dan sebagainya.

### **3. Klasifikasi Pengeluaran Pemerintah**

Menurut Suparmoko (1994), pengeluaran pemerintah dapat dinilai dari berbagai segi sehingga dapat dibedakan menjadi sebagai berikut :

1. Pengeluaran pemerintah adalah investasi yang menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi dimasa yang akan datang.
2. Pengeluaran pemerintah adalah pengeluaran yang langsung memberikan kesejahteraan dan kegembiraan bagi masyarakat.
3. Pengeluaran pemerintah adalah pengeluaran yang akan datang
4. Pengeluaran pemerintah adalah sarana penyedia kesempatan kerja lebih banyak dan penyebaran daya beli yang lebih luas.

### **B. PEMBAYARAN TRANSFER (*TRANSFER PAYMENTS*)**

Samuelson dan Nordhaus (1994) menyebutkan bahwa salah satu jenis pengeluaran pemerintah yang dapat secara langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat adalah *transfer payments* (pembayaran transfer), yaitu pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah kepada individu dan tidak perlu memberikan imbalan balik terhadap pembayaran tersebut. Dengan kata lain, pembayaran transfer pemerintah merupakan pengeluaran pemerintah berupa subsidi atau tunjangan sosial.

Musgrave (1993) menyatakan bahwa pada awalnya program pembayaran transfer bukanlah sebagai alat untuk menyesuaikan distribusi pendapatan tetapi lebih merupakan sebagai alat untuk menyediakan jaminan hari tua dengan dengan dasar pembiayaan swadaya. Sejak saat itu, sistem ini telah bergerak jauh dari prinsip awal dan sekarang lebih merupakan cara untuk pendistribusian kembali. Selain itu, terdapat pula program transfer seperti pembayaran kesejahteraan yang ditujukan langsung untuk menyeimbangkan besarnya distribusi pendapatan.

Apabila tingkat pendapatan per kapita meningkat, kebutuhan untuk, dan ruang lingkup tindakan pendistribusian kembali dapat dipengaruhi dari dua arah. Di satu pihak, kebutuhan untuk pendistribusian kembali (dengan pandangan yang sudah tertentu dari masyarakat mengenai pemerataan) tergantung dari keadaan distribusi yang berlaku sebelum penyesuaian. Jika ketimpangan menurun oleh peningkatan pendapatan per kapita, maka tindakan pendistribusian kembali yang kurang intensiflah yang dibutuhkan. Pada kenyataannya, perubahan ini hanya terjadi dengan tingkat yang kecil saja. Selama bertahun-tahun ukuran distribusi pendapatan secara mengherankan tetap stabil, dengan hanya sedikit kecenderungan ke arah pemerataan pendapatan.

Di pihak lain, program transfer bergantung pada bagaimana tujuan kebijakan pendistribusian kembali itu didefinisikan. Jika tujuannya adalah untuk menyesuaikan pendapatan keluarga sehingga tercapai suatu distribusi relative tertentu dari pendapatan, maka peningkatan tingkat pendapatan rata-rata tidak mengubah kebutuhan untuk pendistribusian kembali. Keadaannya berbeda bila tujuannya adalah untuk mencapai tingkat minimum pendapatan, misalnya biaya pemenuhan kebutuhan gizi minimum. Dalam kasus ini, kebutuhan untuk pendistribusian kembali akan menurun jika pendapatan rata-rata meningkat.

### **C. PENGELUARAN PEMERINTAH DI BIDANG PENDIDIKAN**

Todaro (1993) menyebutkan bahwa sumber daya manusia dari suatu bangsa akan menentukan karakter dan kecepatan dari pembangunan sosial dan ekonomi bangsa itu, dan bukan modal fisik ataupun sumber daya material. Mekanisme kelembagaan yang pokok dalam mengembangkan keahlian dan pengetahuan manusia adalah sistem pendidikan formal. Banyak negara-negara Dunia Ketiga telah digiring dan mempercayai bahwa perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang cepat secara kuantitatif

merupakan kunci utama menuju pembangunan nasional, semakin bertambah pendidikan, semakin cepat pembangunan.

Todaro (1993) juga menyebutkan bahwa di banyak negara berkembang, pendidikan formal adalah “industri” dan konsumen terbesar dalam menggunakan anggaran pemerintah. Bangsa-bangsa yang miskin telah menginvestasikan sejumlah uang yang sangat besar dalam bidang pendidikan. Alasannya bermacam-macam. Petani yang “melek huruf” yang sekurang-kurangnya mengenyam pendidikan dasar dianggap akan lebih produktif dan lebih tanggap dalam menerima teknologi pertanian baru dibandingkan dengan petani-petani yang buta huruf. Tenaga-tenaga ahli dan mekanik yang dilatih secara khusus dan dapat membaca dan menulis dianggap lebih mudah menyesuaikan diri dengan produk-produk dan material-material baru yang terus berubah. Tamatan sekolah menengah pertama dengan sedikit pengetahuan di bidang hitung menghitung dan keahlian administrasi dan teknis dari organisasi-organisasi swasta dan pemerintah dan juga diperlukan untuk menggantikan orang-orang asing. Tamatan universitas dengan latihan yang lebih maju diperlukan untuk mengisi kebutuhan terhadap keahlian managerial yang profesional dalam organisasi-organisasi modern milik swasta dan pemerintah.

### **1. Gambaran Umum Program Bidikmisi**

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan

perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Salah satu upaya yang harus ditempuh dalam mencerdaskan kehidupan bangsa adalah memberikan layanan pendidikan bermutu kepada semua warga negara, antara lain melalui pengaturan biaya pendidikan melalui subsidi silang bagi mereka yang tidak mampu. Subsidi silang biaya operasi perguruan tinggi adalah subsidi yang diberikan oleh peserta didik yang mampu secara finansial kepada peserta didik yang tidak mampu secara finansial, dalam menanggung biaya operasi perguruan tinggi.

Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tersebut di atas perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan Pendidikan. Pendanaan pendidikan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi pengaturan lebih lanjut mengenai tanggung jawab pendanaan, sumber pendanaan, pengelolaan dana, dan pengalokasian dana.

Beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung pemberian bantuan biaya pendidikan diantaranya:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab V pasal 12 (1.c), menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Pasal 12 (1.d), menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Bagian Kelima, Pasal 27 ayat (1), menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan

biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya kurang mampu membiayai pendidikannya. Pasal 27 ayat (2), menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 53A yang menegaskan bahwa satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing wajib menyediakan beasiswa bagi peserta didik berkewarganegaraan Indonesia yang berprestasi dan wajib mengalokasikan tempat bagi calon peserta didik berkewarganegaraan Indonesia, yang memiliki potensi akademik memadai dan kurang mampu secara ekonomi, paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik baru.

Berbagai macam beasiswa oleh pemerintah pusat telah mengimplementasikan amanat peraturan perundang-undangan dengan meluncurkan beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) dan Bantuan Belajar Mahasiswa (BBM) sejak tahun 2008 sampai dengan 2011 sebanyak 180.000-240.000 mahasiswa PTN dan PTS kepada mahasiswa. Akan tetapi jumlah dana yang diberikan masih belum dapat memenuhi kebutuhan biaya pendidikan dan biaya hidup mahasiswa, sehingga belum menjamin keberlangsungan studi mahasiswa hingga selesai.

Mengacu pada peraturan dan perundang-undangan dan kenyataan tentang program beasiswa sebagaimana tersebut di atas, maka Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mulai tahun 2010 telah meluncurkan Program Bantuan Biaya Pendidikan bagi 19.675 mahasiswa yang pada pada tahun 2011 sebanyak 30.000 mahasiswa. Program tersebut

diperuntukkan bagi mahasiswa baru yang memiliki potensi akademik yang memadai dan kurang mampu secara ekonomi untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi negeri pada program studi unggulan yang disebut Program bidikmisi.

Bidikmisi adalah Program pemberian beasiswa dari Pemerintah Indonesia kepada mahasiswa yang memiliki potensi akademik memadai dan kurang mampu secara ekonomi adapun bantuan yang diberikan adalah biaya penyelenggaraan pendidikan dan bantuan biaya hidup sebesar Rp.6.000.000 per semester dengan rincian Rp.400.000 untuk biaya penyelenggaraan pendidikan dan Rp.600.000 untuk biaya hidup disetiap bulannya.

Tujuan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi adalah :

- a. Meningkatkan motivasi belajar dan prestasi calon mahasiswa, khususnya mereka yang menghadapi kendala ekonomi;
- b. Meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi dan berpotensi akademik baik;
- c. Menjamin keberlangsungan studi mahasiswa sampai selesai dan tepat waktu;
- d. Meningkatkan prestasi mahasiswa, baik pada bidang kurikuler, ko-kurikuler maupun ekstra kurikuler;
- e. Menimbulkan dampak iring bagi mahasiswa dan calon mahasiswa lain untuk selalu meningkatkan prestasi dan kompetitif;
- f. Menghasilkan lulusan yang mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam upaya pemutusan mata rantai kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

Persyaratan untuk mendaftar adalah sebagai berikut:

- a. Siswa SMA/SMK/MA/MAK atau bentuk lain yang sederajat yang akan/baru lulus;

- b. Lulusan 1 (satu) tahun sebelumnya yang bukan penerima Bidikmisi dan tidak bertentangan dengan ketentuan penerimaan mahasiswa baru di masing-masing perguruan tinggi;
- c. Usia paling tinggi pada saat mendaftar adalah 21 tahun;
- d. Tidak mampu secara ekonomi sebagai berikut:
  - Pendapatan kotor gabungan orangtua/wali (suami istri) sebesar-besarnya Rp3.000.000,00 per bulan. Pendapatan yang dimaksud meliputi seluruh penghasilan yang diperoleh. Untuk pekerjaan non formal/informal pendapatan yang dimaksud adalah rata rata penghasilan per bulan dalam satu tahun terakhir.
  - Pendapatan kotor gabungan orangtua/wali dibagi jumlah anggota keluarga sebesar-besarnya Rp750.000,00 setiap bulannya.
- e. Pendidikan orang tua/wali setinggi-tingginya S1 (Strata 1) atau Diploma 4.
- f. Berpotensi akademik baik, yaitu direkomendasikan sekolah.

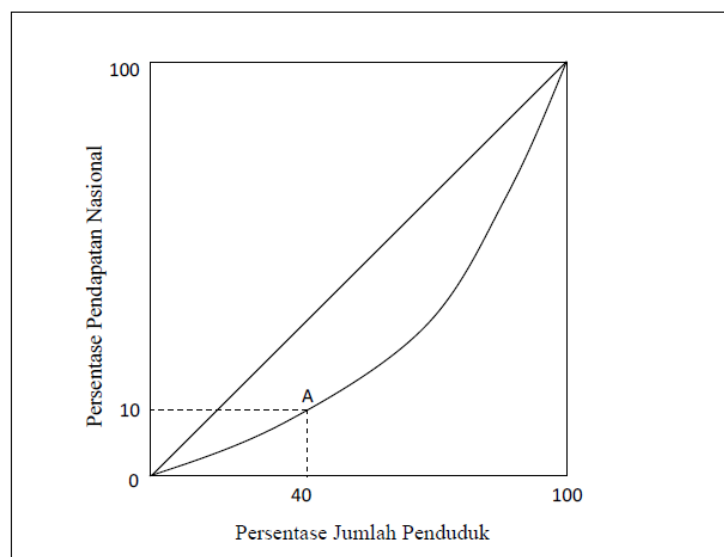
#### **D. DISTRIBUSI PENDAPATAN**

Menurut Dumairy (1996), distribusi pendapatan nasional mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara di kalangan penduduk di negara tersebut. Terdapat berbagai kriteria atau tolak ukur untuk menilai pemerataan distribusi tersebut, salah satu diantaranya adalah dengan kurva Lorenz.

Kurva Lorenz menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan nasional di kalangan lapisan-lapisan penduduk, secara kumulatif pula. Kurva Lorenz terletak di dalam sebuah bujur sangkar yang sisi tegaknya melambangkan persentase kumulatif pendapatan nasional, sedangkan sisi datarnya mewakili persentase kumulatif penduduk. Kurva Lorenz “ditempatkan” pada diagonal utama bujur sangkar tersebut. Kurva Lorenz



yang semakin dekat ke diagonal (semakin lurus) menyiratkan distribusi pendapatan nasional yang semakin merata. Sebaliknya, jika Kurva Lorenz semakin jauh dari diagonal (semakin lengkung), maka kurva tersebut mencerminkan keadaan yang semakin buruk, yaitu distribusi pendapatan nasional semakin timpang atau tidak merata. Pada gambar 1, titik A mencerminkan 40% penduduk berpendapatan terendah menghasilkan atau hanya memiliki 10% pendapatan nasional.

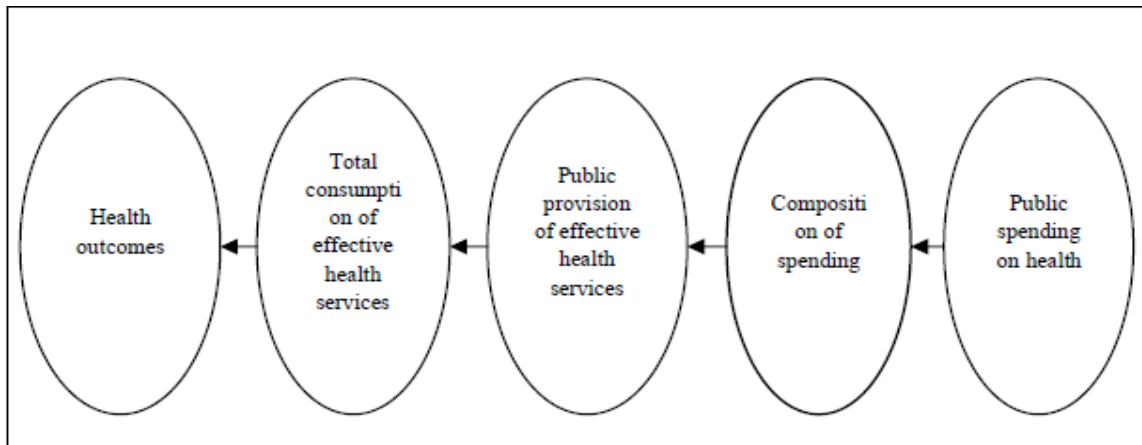


**Gambar 1. Kurva Lorenz**

#### **E. TEORI PEMBAGIAN MANFAAT (*BENEFIT INCIDENCE THEORY*)**

Demery (2000) mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah mempengaruhi penduduk dengan beberapa cara: *Pertama*, kebijakan fiskal mempengaruhi keseimbangan makro ekonomi, khususnya defisit keuangan dan perdagangan serta tingkat inflasi. Perubahan ini sebaliknya mempengaruhi standar hidup dan secara langsung mempengaruhi pendapatan riil dan secara tidak langsung melalui perubahan tingkat pertumbuhan ekonomi. *Kedua*, pengeluaran publik menciptakan pendapatan secara langsung, beberapa di antaranya boleh jadi bermanfaat bagi rumah tangga miskin. Sebaliknya pendapatan ini menciptakan pendapatan lain melalui proses penggandaan pendapatan-pengeluaran. Disinilah terjadi apa yang disebut dengan *primary-income effect*

(efek pendapatan pokok). *Ketiga*, pengeluaran publik memunculkan peralihan kepada penduduk. Hal ini bisa berbentuk pengalihan tunai atau pengalihan keuangan seperti bantuan sosial, pembayaran asuransi dan sejenis nya. Termasuk didalamnya adalah subsidi pelayanan pemerintah seperti kesehatan, pendidikan, dan pelayanan infrastruktur.



Sumber: Demery (2000)

**Gambar 2. Hubungan Pengeluaran Pemerintah dengan Hasil yang akan dicapai**

Gambar 2 menunjukkan adanya hubungan yang menunjukkan saling keterkaitan. Kerangka pemikiran tersebut menunjukkan adanya empat hubungan dasar. Pertama adalah hubungan antara total belanja publik atas kesehatan dengan komposisinya. Apabila anggaran untuk kesehatan dialokasikan pada layanan publik yang memiliki dampak yang kecil atau sedikit dalam masyarakat luas maka hubungannya akan melemah. Kemudian pada garis hubungan yang kedua merupakan penjabaran anggaran kedalam pelayanan masyarakat yang efektif. Apabila pengeluaran pada sektor tersebut tidak tepat sasaran, maka pengeluaran tersebut dapat dikatakan sebagai indikator kurang baiknya penyediaan layanan tersebut, walaupun penyediaan pelayanan tersebut sangat potensial. Pada hubungan yang ketiga, menunjukkan bagaimana jumlah penyediaan layanan masyarakat yang efektif dipengaruhi oleh belanja publik. Apabila penyediaan barang publik tersebut melebihi penyediaan dari swasta maka efek dari total dari penyediaan layanan kesehatan

akan menurun. Hubungan yang terakhir adalah antara penyediaan layanan kesehatan baik publik maupun swasta dengan peningkatan kesehatan masyarakat pada level individu.

*Benefit Incidence Analysis* adalah alat analisis yang fokus terhadap hubungan yang pertama, yaitu kepada siapa pemerintah memberikan manfaat layanan-layanan masyarakat yang bertujuan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat miskin. Ketika menganalisis pengeluaran terhadap suatu fasilitas, maka dapat juga dihubungkan dengan hubungan yang kedua.

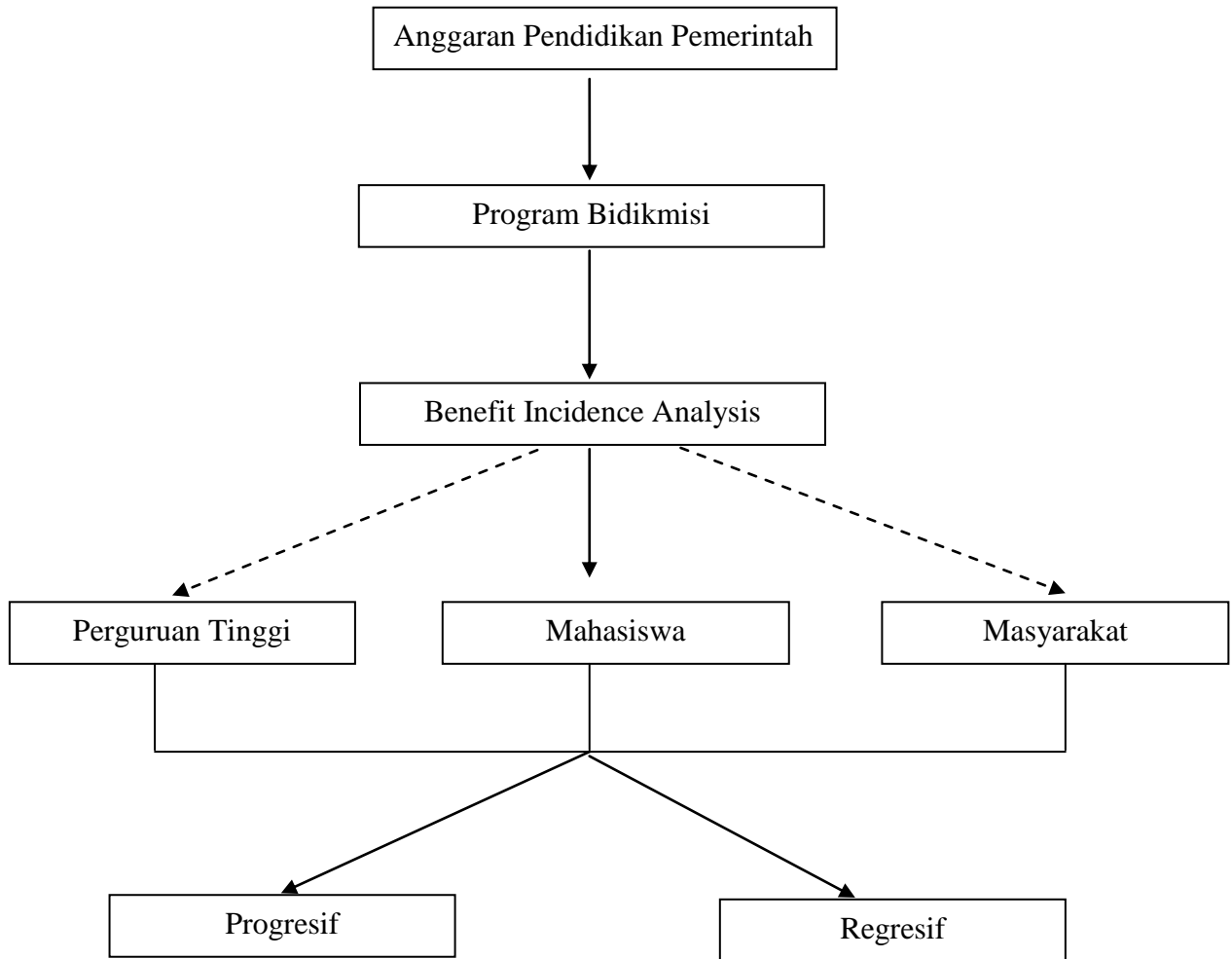
## **F. KERANGKA BERFIKIR**

Pengeluaran pemerintah pada sektor publik merupakan bentuk campur tangan pemerintah yang paling nyata dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu negara. Salah satu alokasi pengeluaran pemerintah yang sangat penting adalah pada perbaikan mutu dan partisipasi pendidikan. Program Bidikmisi merupakan kebijakan yang memberikan pengaruh signifikan dalam upaya peningkatan mutu dan juga pemerataan pendidikan tinggi di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan program bidikmisi merupakan program bantuan bagi upaya partisipasi warga miskin yang mempunyai kemampuan akademik baik untuk mengikuti pendidikan tinggi.

Sebuah kebijakan harus memperhatikan target serta progresifitas dari kebijakan itu sendiri, sehingga diperlukan identifikasi terhadap masyarakat yang akan menerima bantuan agar subsidi yang diberikan tepat sasaran. Analisis dalam penelitian ini menggunakan model *Benefit Incidence Analysis* (BIA) untuk dapat menganalisis dampak atau manfaat yang diberikan oleh kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam *Benefit Incidence Analysis*, analisis dilakukan dengan menggabungkan data dari biaya penyediaan dana bantuan tersebut dan data dari penggunaan subsidi pemerintah oleh masyarakat. Masyarakat-masyarakat tersebut juga digolongkan ke dalam grup-grup yang didasarkan dengan pendapatan atau pengeluaran

mereka untuk dapat mengidentifikasi penerima dari subsidi tersebut. Dalam penelitian ini penggolongan masyarakat tersebut, digolongkan menjadi lima grup yang disebut *Quintile* (kuintil).

Hasil yang diperoleh kemudian di interpretasikan dalam kurva Lorenz. Suatu kebijakan dikatakan kebijakan yang progresif apabila kurva yang dihasilkan dari *Benefit Incidence Analysis* melengkung di atas kurva Lorenz dari pendapatan atau pengeluaran namun masih di bawah garis diagonal 45 derajat. Garis diagonal tersebut mencerminkan kesetaraan yang sempurna dalam pembagian manfaat subsidi bagi masyarakat dan disebut juga garis *perfect equality*. Program bidikmisi tersebut dapat juga dikatakan kebijakan yang *pro-poor* apabila persentase penerima manfaat dari bidikmisi lebih besar untuk masyarakat kurang mampu dari pada masyarakat yang mampu yang ditunjukkan dengan kurva konsentrasi yang berada di atas garis *perfect equality*. Apabila kurva konsentrasi berada di bawah garis *perfect equality* dan di bawah kurva Lorenz maka kebijakan tersebut dapat dikatakan regresif.



**Gambar 3. Kerangka Berfikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. DESAIN PENELITIAN**

Pelaksanaan penelitian ini akan menggunakan metode atau pendekatan deskriptif kualitatif, hal tersebut dilakukan karena penelitian ini digunakan untuk menggambarkan secara jelas persoalan yang terjadi seputar penggunaan dan pengalokasian dana program bidikmisi serta menganalisis sejauh mana ketercakupan dana program bidikmisi tersebut dalam hal layanan bagi mahasiswa tidak mampu. Analisis yang dihasilkan tidak berupa angka-angka saja namun berupa telaah yang lebih mendalam dengan menggabungkan metode kuantitatif dengan model *Benefit Insidance Analysis* yang kemudian diperkuat dengan penjabaran statistik sederhana dari data yang ada.

#### **B. DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL**

1. Pengeluaran pemerintah atas pendidikan merupakan besarnya pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan sektor pendidikan. Pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan didekati dengan jumlah pengeluaran untuk dana subsidi bidikmisi.
2. Pendapatan rumah tangga merupakan variabel yang digambarkan dengan total pendapatan rata-rata tiap orang tua mahasiswa penerima bidikmisi yang menjadi responden untuk setiap bulannya.
3. Pengeluaran rumah tangga atas pendidikan didekati dengan jumlah pengeluaran orang tua siswa yang menjadi responden untuk setiap bulannya setelah adanya bantuan dana dari program bidikmisi.

## C. POPULASI DAN SAMPEL

### 1. Populasi

Supranto (2000) mengartikan populasi adalah kumpulan yang lengkap dari elemen-elemen yang sejenis akan tetapi dapat dibedakan karena karakteristiknya. Populasi menurut Anto Dajan (1989) adalah keseluruhan unsur-unsur yang memiliki satu atau beberapa karakteristik yang sama, sedangkan pengertian menurut Sutrisno Hadi (1994). Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang memperoleh bantuan program bidikmisi.

### 2. Sampel

Pengertian sampel adalah sebagian dari populasi yang diteliti. Sedangkan sampling adalah cara pengumpulan data dimana yang diselidiki adalah elemen-elemen sampel dari suatu populasi (Supranto, 2000). Penentuan sampel merupakan langkah penting dalam penelitian kuantitatif, konsep dasar dari penentuan sampel adalah bahwa agregasi dari orang, rumah tangga atau organisasi yang sangat besar dapat dikaji secara efektif dan efisien serta akurat melalui pengkajian yang terinci dan hati-hati pada sebagian agregasi yang terpilih. *Agregasi* (Keseluruhan) disebut *populasi* atau *universe* yang terdiri dari unit total informasi yang ingin diketahui. Dari populasi yang ingin dikaji kemudian ditentukan sampelnya, melalui prosedur *sampling* yang sesuai dengan karakteristik populasinya.

Adapun langkah-langkah dalam penentuan sampel adalah :

- a. Mendefinisikan populasi yang akan dijadikan obyek penelitian
- b. Menentukan prosedur sampling
- c. Menentukan besarnya sampel

Pendefinisian populasi merupakan langkah pertama yang sangat penting, dari sini dapat tergambar bagaimana keadaan populasi, sub-sub unit populasi, karakteristik

umum populasi serta keluasan dari populasi tersebut. Dalam hubungan ini perlu dibedakan antara populasi target (*Target/actual population*) yaitu semua mahasiswa bidikmisi dan populasi terjangkau (*Accessible population*) yaitu mahasiswa di PTN dan PTS yang dapat dijadikan sampel. Populasi target adalah populasi yang ingin digeneralisasi oleh peneliti, sedangkan populasi terjangkau adalah populasi yang dapat digeneralisasi oleh peneliti, target populasi merupakan pilihan ideal dan populasi terjangkau merupakan pilihan yang realistis.

Pengambilan sampel dengan cara yang sudah disebutkan di atas umumnya dilakukan pada populasi yang bersifat terbatas (*finit*), sementara itu untuk populasi yang jumlah dan identitas anggota populasinya tidak diketahui (*Infinit*) pengambilan sampel biasanya dilakukan secara tidak acak (*Non random Sampling*). Adapun yang termasuk pada cara ini adalah :

1. *Quota Sampling* : yaitu penarikan sampel yang hanya menekankan pada jumlah sampel yang harus dipenuhi.
2. *Purposive Sampling* : pengambilan sampel hanya pada individu yang didasarkan pada pertimbangan dan karakteristik tertentu.
3. *Accidental Sampling* : pengambilan sampel dengan jalan mengambil individu siapa saja yang dapat dijangkau atau ditemui.

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu mahasiswa penerima bidikmisi. Pada teknik ini, populasi dikelompokkan menjadi kelompok populasi atau subpopulasi, kemudian sampel ditarik dari subpopulasi tersebut, tetapi tidak semua anggota kelompok populasi menjadi anggota sampel. Hanya sebagian dari anggota subpopulasi menjadi anggota sampel. Cara penarikan sampel pada subpopulasi dilakukan secara proporsional (*proportional sampling*). Cara pengambilan sampelnya dengan snowball dimana



setelah kita menemukan mahasiswa bidikmisi lantas diinformasikan teman mahasiswa yang memperoleh bidikmisi. Pencarian responden tanpa melihat data di PT untuk memperoleh data yang obyektif.

Kelompok-kelompok responden dibagi berdasarkan jumlah pendapatan yang diperoleh oleh keluarga masing-masing kelompok (kuintil) dengan perincian sebagai berikut :

1. Kuintil 1 (Q1) yaitu *Lowest Income/poor* , dibawah Rp. 1.000.000,-.
2. Kuintil 2 (Q2) yaitu *Low-middle income* , Rp. 1.000.001,- sampai dengan Rp. 2.000.000,-.
3. Kuintil 3 (Q3) yaitu *Middle Income* , Rp.2.000.001,- sampai dengan Rp. 3.000.000,-.
4. Kuintil 4 (Q4) yaitu *Upper-Middle Income* , Rp.3.000.001 sampai dengan Rp.4.000.000,-.
5. Kuintil 5 (Q5) yaitu *Rich* , diatas Rp. 4.000.000,-

#### **D. ALAT ANALISIS**

Model yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model *Benefit Incidence Analysis* (BIA). *Benefit Incidence Analysis* adalah alat analisis yang digunakan untuk menganalisis kebijakan pemerintah dalam hal subsidi untuk barang publik dan menilai dampak atau manfaat yang diberikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam BIA, analisis terhadap distribusi dari subsidi pemerintah tersebut dilakukan dalam grup-grup yang berbeda dalam masyarakat, dalam hal ini adalah perbedaan dalam total pendapatan rumah tangga. *Benefit Incidence Analysis* fokus dalam menganalisis apakah kebijakan pengeluaran publik yang dilakukan oleh pemerintah adalah kebijakan yang progresif, yaitu program yang mendukung distribusi

kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu BIA menggabungkan data dari penggunaan subsidi pemerintah oleh masyarakat dan juga data dari biaya penyediaan dana bantuan tersebut untuk menilai distribusi manfaat dari subsidi pemerintah untuk semua grup-grup yang digolongkan berdasarkan pendapatan tersebut.

*Benefit Incidence Analysis* pada dasarnya terdiri dari tiga langkah (Demery, 2000), antara lain adalah :

- 1) Menghitung jumlah dari subsidi yang disediakan oleh pemerintah yang berasal dari data resmi pemerintah dan bukan merupakan rancangan pengeluaran tetapi realisasi dari pengeluaran pemerintah tersebut.
- 2) Mengidentifikasi penerima subsidi dari pemerintah. Meskipun data untuk penerima subsidi dapat diambil dari dinas terkait, tetapi untuk melihat bagaimana subsidi didistribusikan kepada golongan masyarakat yang majemuk (khususnya dalam pendapatan atau pengeluaran) maka harus didukung dengan survey terhadap sampel yang telah ditentukan.
- 3) Menggolongkan dan mengurutkan masyarakat berdasarkan pendapatan atau pengeluarannya kedalam grup-grup (*Quintiles* atau *Deciles*).

Penggolongan pendapatan atau pengeluaran ini sangat penting dalam *Benefit Incidence Analysis* karena menjadi indikator kesejahteraan masyarakat yang akan menentukan apakah subsidi pemerintah tersebut diberikan kepada yang benar-benar membutuhkan, yaitu masyarakat yang paling miskin.

Rumus yang digunakan dalam penghitungan *Benefit Incidence Analysis* adalah sebagai berikut (Demery, 2000) :

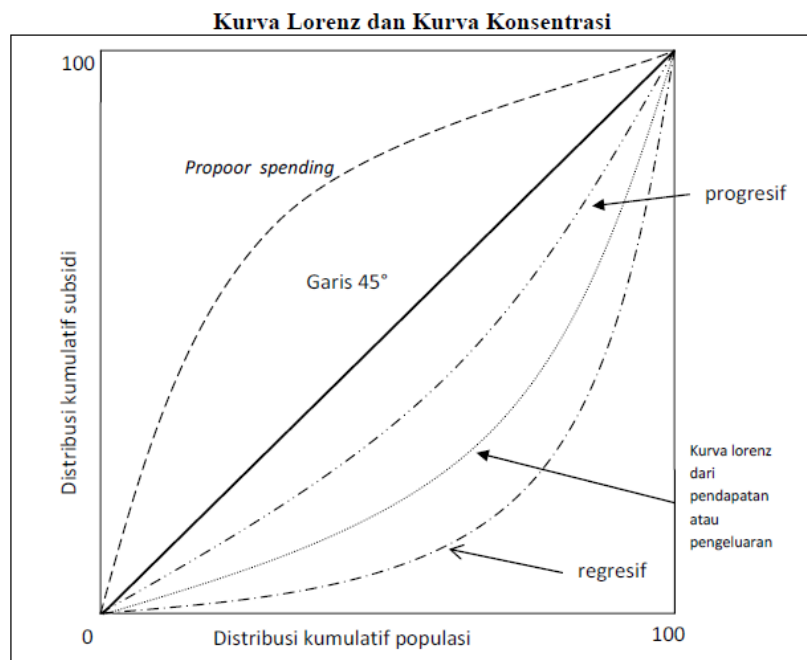
$$X_j \equiv \sum_{k=1}^n \sum_{i=1}^3 \frac{E_{ijk}}{E_i} \left( \frac{S_{ik}}{S} \right) \equiv \sum_{k=1}^n \sum_{i=1}^3 e_{ijk} S_{ik}$$

Keterangan :

$X_j$  = Nilai total subsidi pendidikan yang dihubungkan dengan kelompok (j).

- $E_{ijk}$  = Mewakili sejumlah mahasiswa yang terdaftar pada kelompok ( j ) pada tingkatan pendidikan ( i ).
- $E_i$  = Total jumlah terdaftar (diantara semua kelompok) pada tingkatan pendidikan tinggi.
- $S_i$  = Pengeluaran bersih pemerintah untuk program bidikmisi ( i ).

Hasil yang diperoleh kemudian diinterpretasikan dalam kurva Lorenz dan kurva konsentrasi pada gambar 4 (dengan *Deciles*) dimana jumlah pengeluaran yang masih harus dilakukan oleh masyarakat setelah adanya alokasi dana Bidikmisi dicerminkan pada sumbu horisontal sedangkan sumbu vertikal mencerminkan jumlah total populasi yang diwakili oleh sampel yang diambil.



Sumber : Cuenca (2008, h.5)

**Gambar 4. Kurva Lorenz dan Kurva Konsentrasi**

Progresivitas suatu belanja publik dapat ditunjukkan dengan kurva lorenz, yaitu dengan membandingkan kurva konsentrasi manfaat dengan garis diagonal 45 derajat. Garis diagonal 45 derajat mencerminkan kesetaraan yang sempurna dalam pembagian manfaat subsidi bagi masyarakat. Apabila kurva konsentrasi manfaat terletak di atas garis diagonal 45 derajat maka 10 persen penduduk termiskin dalam populasi menerima lebih dari 10 persen manfaat subsidi sehingga distribusi manfaat dikatakan bersifat progresif

secara absolut. Sebaliknya, apabila kurva konsentrasi manfaat terletak dibawah garis diagonal, maka 10 persen Distribusi kumulatif populasi penduduk termiskin dari populasi mendapat kurang dari 10 persen dari manfaat subsidi sehingga dapat dikatan regresif secara absolut.

Di sisi lain, kurva konsentrasi manfaat yang terletak di atas kurva Lorenz dari pendapatan menandakan subsidi yang diberikan pemerintah relatif progresif terhadap pendapatan. Kurva tersebut menandakan 10 persen penduduk termiskin dari populasi mendapatkan distribusi manfaat lebih besar dari pendapatan. Sebaliknya, jika kurva konsentrasi manfaat berada dibawah kurva Lorenz dari pendapatan maka subsidi pemerintah bersifat regresif dari pendapatan (Cuenca, 2008).

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. DESKRIPSI DATA**

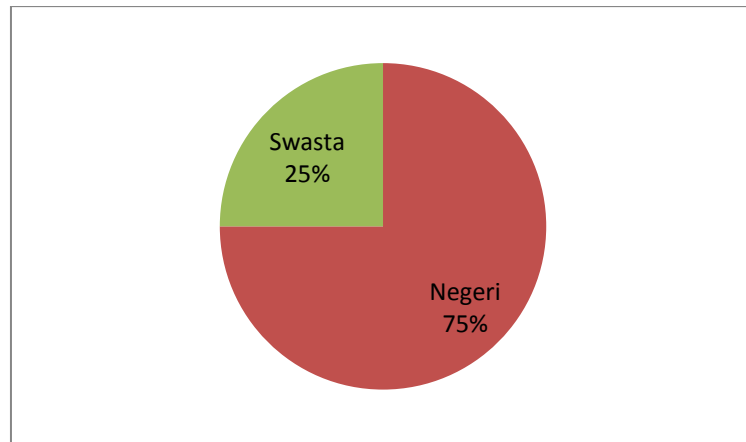
Data yang diperoleh berdasarkan survey di lapangan dengan cara mencari mahasiswa penerima bidikmisi. Hal tersebut dilakukan untuk memperoleh data yang akurat dan obyektif. Apabila penentuan responden berdasarkan data yang ada di perguruan tinggi bersangkutan dikhawatirkan akan berdampak pada jawaban yang kurang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Jumlah mahasiswa penerima bidikmisi di Provinsi DIY paling banyak di Universitas Gadjah Mada dan Universitas Negeri Yogyakarta, sebagian kecil saja yang terdapat di perguruan tinggi swasta, oleh karena itu dalam penelitian ini, jumlah responden paling banyak berasal dari kedua perguruan tinggi negeri tersebut. Dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, diperoleh jumlah responden sebesar 96 mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta dari berbagai program studi. Dari 96 responden tersebut terdiri dari 2 perguruan tinggi negeri dan 5 perguruan tinggi swasta.

#### **1. Karakteristik Responden Berdasarkan Status PT**

Responden yang diperoleh berdasarkan status perguruan tinggi adalah responden perguruan tinggi negeri sebesar 72 mahasiswa atau 75 persen dan responden PTS sebesar 24 mahasiswa atau 25 persen. Jumlah responden perguruan tinggi negeri jauh lebih besar karena populasi mahasiswa bidikmisi paling banyak adalah mahasiswa di perguruan tinggi negeri yaitu UNY dan UGM. Pemberian beasiswa bidikmisi pada mulanya memang hanya ditujukan untuk mahasiswa yang kuliah di PTN, pada perkembangannya diperluas di PTS dengan jumlah masih terbatas.

**Tabel 2. Karakteristik responden berdasarkan status perguruan tinggi**

Status PT	Jumlah
Negeri	72
Swasta	24
	96



**Gambar 5. Persentase responden berdasarkan status perguruan tinggi**

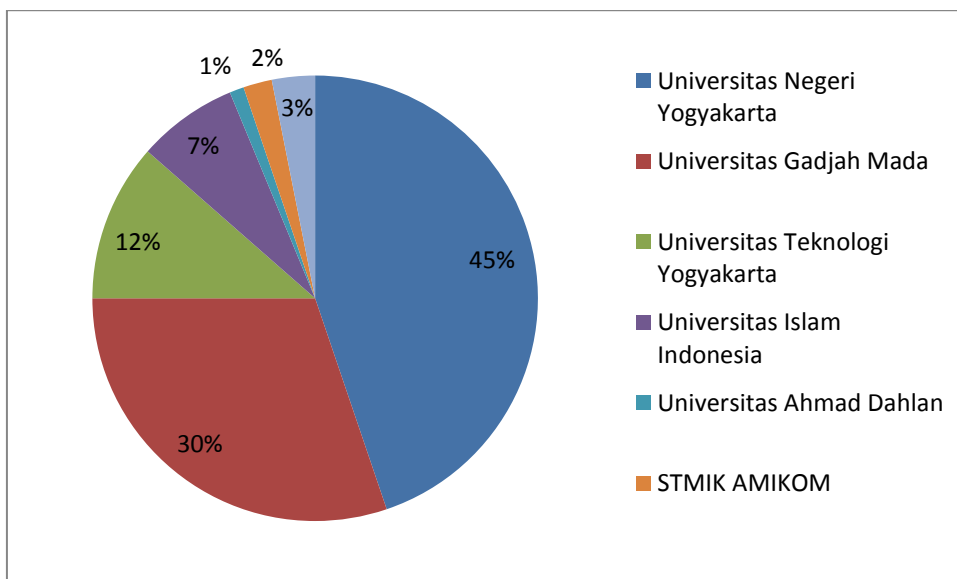
## **2. Karakteristik Responden Berdasarkan PT Asal**

Dalam tabel 3 dibawah ini, berdasarkan asal perguruan tinggi, responden paling banyak berasal dari UNY sebanyak 43 mahasiswa atau 45 persen dari keseluruhan responden, dari UGM sebanyak 29 mahasiswa atau 29 persen. Apabila dijumlahkan responden kedua perguruan tinggi tersebut mencapai 72 mahasiswa atau 75 persen dari total sampel. Sedangkan responden yang berasal dari perguruan tinggi swasta adalah 24 mahasiswa atau 25 persen yang terdiri dari total responden.

**Tabel 3. Karakteristik responden berdasarkan perguruan tinggi asal**

Perguruan Tinggi Asal	Jumlah
Universitas Negeri Yogyakarta	43
Universitas Gadjah Mada	29
Universitas Teknologi Yogyakarta	11
Universitas Islam Indonesia	7
Universitas Ahmad Dahlan	1
STMIK AMIKOM	2
Akademi Kebidanan Yogyakarta	3

Dari tabel diatas, untuk perguruan tinggi swasta, Universitas Teknologi Yogyakarta merupakan responden paling banyak dengan jumlah 11 mahasiswa atau 12 persen disusul oleh Universitas Islam Indonesia dengan jumlah 7 mahasiswa atau 7 persen. Berikutnya mahasiswa Akademi Kebidanan Yogyakarta sebanyak 3 mahasiswa atau 3 persen, STMIK AMIKOM dengan 2 mahasiswa atau 2 persen dan paling sedikit Universitas Ahmad Dahlan dengan hanya memperoleh 1 mahasiswa atau 1 persen.



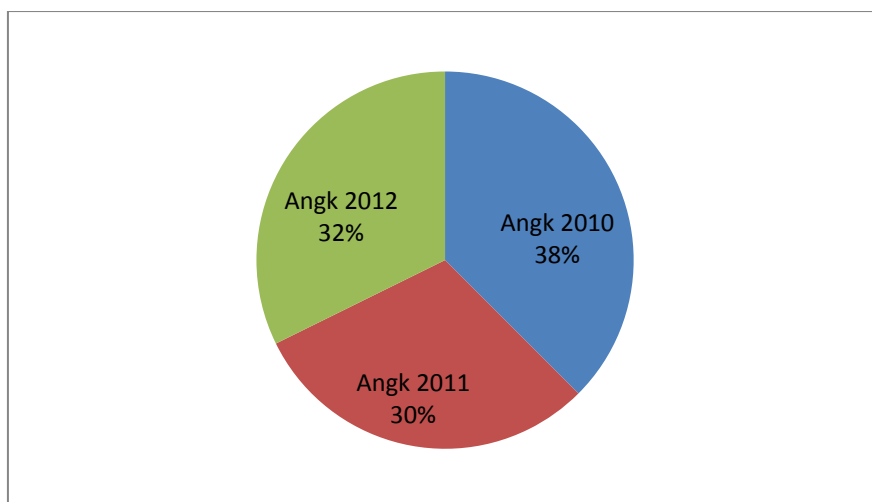
**Gambar 6. Persentase responden berdasarkan perguruan tinggi asal**

### 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Angkatan

Untuk memperoleh hasil yang baik, sampel responden yang dikumpulkan berasal dari berbagai angkatan, mulai dari tahap pertama program bidikmisi diluncurkan yaitu pada tahun 2010 sampai dengan angkatan tahun terakhir atau tahun 2012, sehingga secara keseluruhan mahasiswa bidikmisi yang dijadikan responden adalah mahasiswa yang telah duduk di semester 3, 5 dan 7. Dari ketiga angkatan tersebut dapat dilihat progres kinerja mahasiswa yang memperoleh bidikmisi. Dalam tabel 3 dibawah ini, dapat dilihat angkatan 2010 merupakan responden paling banyak dengan 36 mahasiswa atau 38 persen, angkatan 2011 sejumlah 28 mahasiswa atau persen dan mahasiswa angkatan 2012 berjumlah 32 orang atau persen.

**Tabel 4. Karakteristik responden berdasarkan Angkatan**

Angkatan	Jumlah
2010	36
2011	29
2012	31
	96



**Gambar 7. Persentase responden berdasarkan angkatan**



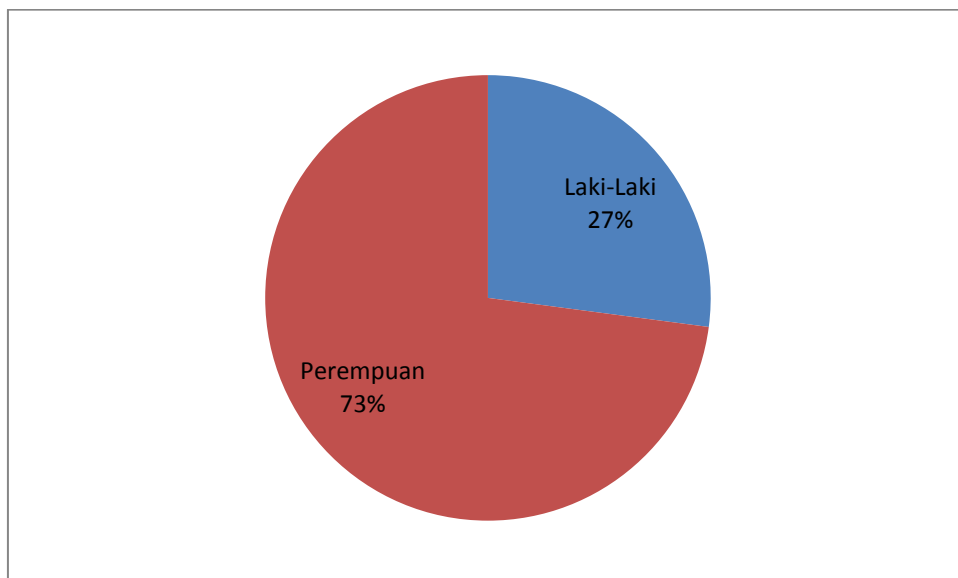
#### 4. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis kelamin

Meskipun jenis kelamin tidak terlalu penting dalam pemberian bidikmisi, untuk data yang baik, karakteristik tersebut sebaiknya ditampilkan.

**Tabel 5. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin**

Jenis kelamin	Jumlah
Laki-Laki	26
Perempuan	70
	96

Dari tabel 5 diatas, diketahui responden perempuan jauh lebih banyak mencapai 73 persen atau 70 mahasiswa dan reponden laki-laki sebanyak 26 orang atau 27 persen.



**Gambar 8. Persentase responden berdasarkan jenis kelamin**

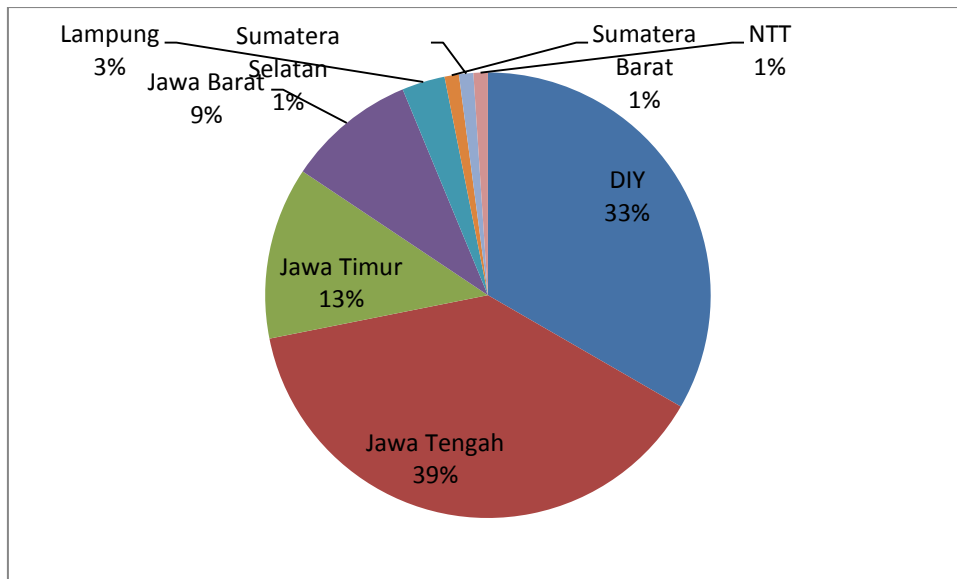
## B. LATAR BELAKANG SOSIAL DAN EKONOMI

### 1. Asal Tempat Tinggal

Asal tempat tinggal dijadikan sebagai indikator pelaksanaan bidikmisi, asal tempat tinggal yang berdekatan dengan kampus memungkinkan perguruan tinggi dapat melakukan survey atau visitasi ke tempat tinggal calon mahasiswa. Pada responden yang diperoleh, terdapat 32 mahasiswa berasal dari Provinsi DIY, lokasi kabupaten-kota yang berada tidak jauh dari kampus di Yogyakarta. Terdapat 37 responden yang berasal dari Jawa Tengah, kemudian 12 responden dari Jawa Timur. Ketiga provinsi tersebut berdekatan dengan provinsi DIY sehingga memungkinkan mahasiswa di DIY lebih banyak berasal dari provinsi tersebut. Jawa Barat yang masih berada di Pulau Jawa dengan 9 responden, Lampung 3 responden dan Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan Nusa Tenggara Timur masing-masing 1 responden. Adanya responden yang berasal jauh dari DIY dan memperoleh bantuan bidikmisi memungkinkan data yang diperoleh dalam penelitian ini saling berkaitan, misalnya terdapat mahasiswa bidikmisi yang dulunya tidak dilakukan survey tempat tinggal terlebih dahulu.

**Tabel 6. Asal Tempat Tinggal**

No	Asal Provinsi	Jumlah
1	DIY	32
2	Jawa Tengah	37
3	Jawa Timur	12
4	Jawa Barat	9
5	Lampung	3
6	Sumatera Barat	1
7	Sumatera Selatan	1
8	NTT	1
		96



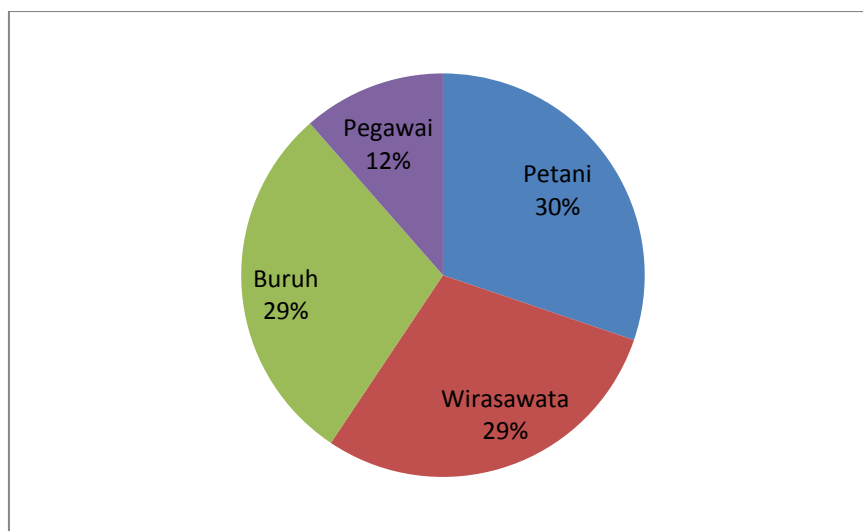
**Gambar 9. Persentase asal tempat tinggal**

## 2. Jenis Pekerjaan Orangtua

Dilihat dari jenis pekerjaan, sebagian besar orangtua mahasiswa bidikmisi berprofesi sebagai petani sebesar 29 orang, kemudian yang berprofesi sebagai wiraswasta sebanyak 28 orang, buruh 28 orang dan pegawai sebanyak 11 orang. Beberapa jenis profesi tersebut merupakan pekerjaan yang mempunyai tingkat penghasilan rendah, meskipun sebagian berprofesi sebagai wiraswasta akan tetapi jenis wiraswasta yang dijalani tidaklah berpenghasilan tinggi seperti bengkel, penjahit dan pedagang di pasar tradisional. Demikian juga orangtua yang berprofesi sebagai pegawai merupakan pegawai rendah dengan penghasilan kurang dari Rp. 2.000.000.

**Tabel 7. Jenis Pekerjaan Orangtua**

Pekerjaan	Jumlah
Petani	29
Wirasawata	28
Buruh	28
Pegawai	11
	96



**Gambar 10. Persentase jenis pekerjaan orangtua**

Dari gambar 8 tersebut jelaslah sebagian besar mahasiswa bidikmisi mempunyai orangtua yang pekerjaannya berpenghasilan rendah seperti petani mencapai 30 persen, buruh dan wiraswata kecil 29 persen dan pegawai 12 persen.

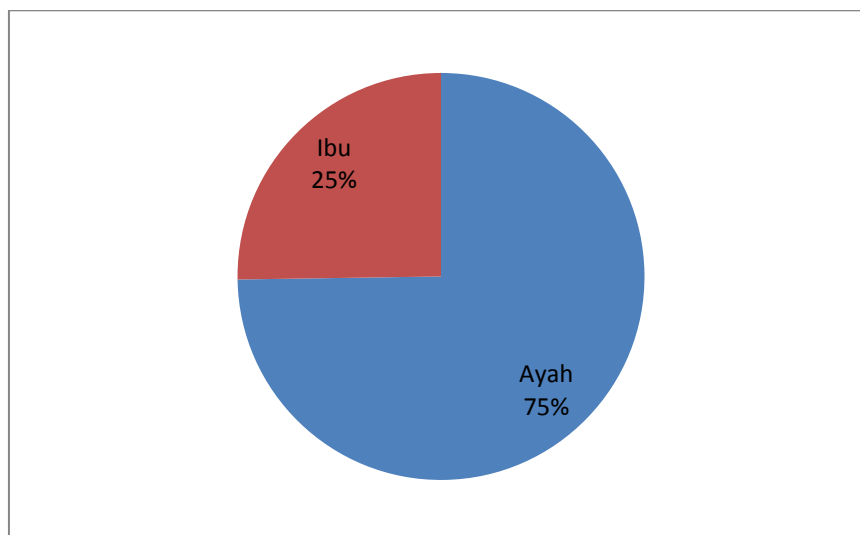
### 3. Rata-Rata Pendapatan Orangtua

Rata-rata pendapatan orangtua merupakan indikator penting dalam analisis pembagian manfaat (*benefit incidence analysis*). Hal tersebut mencerminkan profil masyarakat penerima subsidi dana pendidikan melalui beasiswa bidikmisi. Dari pendapatan orangtua, dapat diukur kemampuan dalam memberikan pendidikan kepada anak-anaknya apalagi untuk pendidikan tinggi yang membutuhkan lebih banyak biaya.

**Tabel 8. Rata-rata pendapatan orangtua**

Pendapatan	Jumlah (Rp)
Ayah	1.045.760
Ibu	353.021
	1.398.781

Dalam tabel diatas, pendapatan ayah tertinggi adalah Rp. 3.000.000,- perbulan dan terendah Rp. 500.000,- perbulan. Sedangkan pendapatan ibu tertinggi adalah Rp. 2.000.000,-. Adapun secara rata-rata pendapatan ayah hanya sebesar Rp 1.045.760 dan pendapatan ibu sebesar Rp.353.021 setiap bulannya. Rata-rata pendapatan gabungan kedua orangtua yang hanya mencapai Rp. 1.398.781 memenuhi ketentuan dalam penentuan keluarga mahasiswa yang berhak memperoleh bidikmisi yaitu maksimal Rp. 3.000.000. Sedangkan apabila dicari pendapatan perkapita anggota keluarga yang masih menjadi tanggungan orangtua adalah Rp. 512.531 perbulan. Jumlah ini masih dibawah ketentuan yaitu Rp. 600.000.



**Gambar 11. Persentase pendapatan orangtua**

Dari gambar 9, pendapatan ayah merupakan sumber utama pendapatan dalam keluarga responden mencapai 75 persen. Sedangkan 25 persen berasal dari ibu yang ikut bekerja. Data tersebut juga dapat dibaca bahwa sebagian besar orangtua responden, ayah merupakan tulang punggung keluarga dan ibu banyak yang sebagai ibu rumah tangga saja.

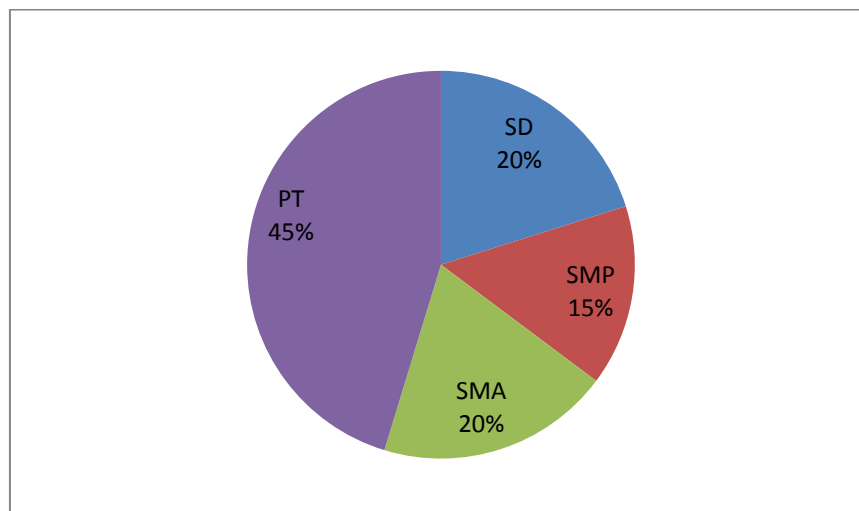
#### 4. Jumlah tanggungan pendidikan Orangtua

Rata-rata setiap keluarga masih menanggung beban untuk membiayai pendidikan dan hidup 3 orang, dimana yang menjadi tanggungan pendidikan terdiri dari:

**Tabel 9. Jumlah tanggungan orangtua**

Tingkat Pendidikan	Jumlah
SD	32
SMP	24
SMA	31
PT	72
	159

Dilihat dari tabel diatas, orangtua masih menanggung kebutuhan pendidikan anak-anaknya, dimana tanggungan paling banyak adalah anak yang masih kuliah di perguruan tinggi, kemudian SD sebanyak 32 orang, SMA 31 orang dan SMP 24 orang. Keadaan tersebut menunjukkan orangtua responden masih mempunyai tanggungan pendidikan anak-anaknya.



**Gambar 12. Persentase tanggungan pendidikan orangtua**

Tanggungannya paling banyak adalah perguruan tinggi 45 persen, kemudian SMA 20 persen, SD 20 persen dan SMP 15 persen.

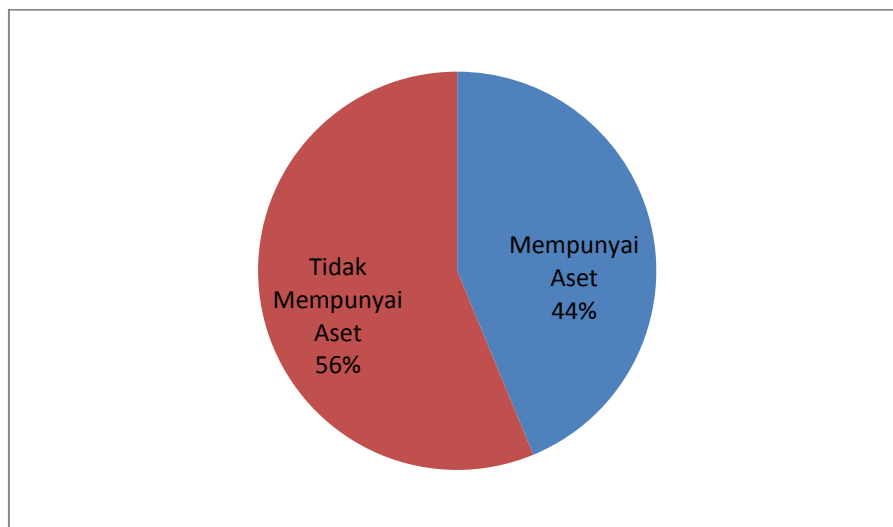
### 5. Kepemilikan Aset

Apabila karakteristik mahasiswa diidentifikasi berdasarkan kepemilikan aset, lebih dari separuh yaitu 54 keluarga tidak memiliki aset atau harta kekayaan.

**Tabel 10. Kepemilikan aset**

<b>Kepemilikan</b>	<b>Jumlah (Keluarga)</b>
Mempunyai Aset	42
Tidak Mempunyai Aset	54

Sebanyak 56 persen orangtua responden tidak memiliki aset dan hanya 44 persen yang memiliki harta kekayaan



**Gambar 13. Persentase kepemilikan aset**

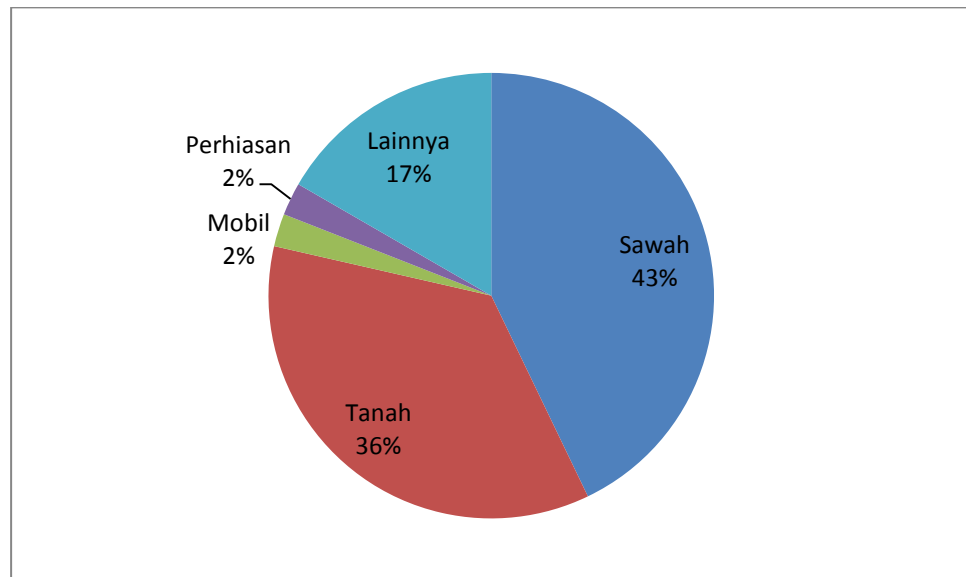
Dari ke 42 keluarga atau 44 persen yang memiliki aset, dapat dibagi lagi menjadi beberapa macam jenis kepemilikan aset.

**Tabel 11. Jenis kepemilikan aset**

<b>Jenis Aset</b>	<b>Jumlah (Keluarga)</b>
Sawah	18
Tanah	15

Mobil	1
Perhiasan	1
Lainnya	7
	42

Dari table 11, sebanyak 18 keluarga atau 43 persen mempunyai sawah, 15 keluarga atau 36 persen mempunyai tanah dan masing-masing satu keluarga mempunyai mobil dan perhiasan atau sekitar 2 persen dan kekayaan lainnya mencapai 7 keluarga atau 17 persen.



**Gambar 14. Persentase jenis kepemilikan aset**

## 6. Rata-Rata Pengeluaran Rumah Tangga

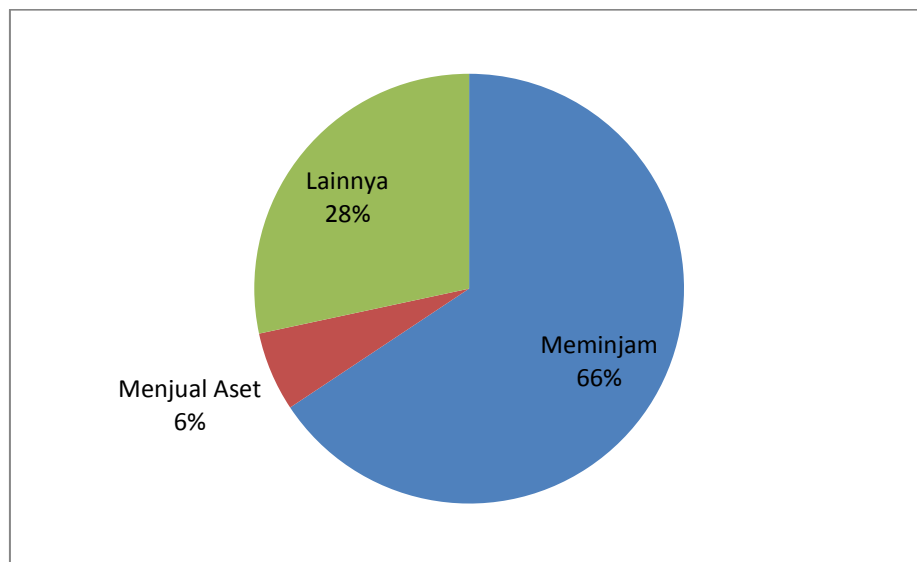
Rata-rata pengeluaran rumah tangga/keluarga Rp. 1.450.521 perbulan, pengeluaran tersebut lebih besar daripada rata-rata penghasilan Rp 1.398.781 sehingga secara umum, pendapatan belum bisa untuk mencukupi kebutuhan hidup. Sebanyak 29 responden (27 persen) menyatakan pendapatan orangtuanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sedangkan 67 responden (73 persen) menyatakan tidak cukup. Untuk menutup kekurangan kebutuhan tersebut, ada yang meminjam ke orang lain/ keluarga lainnya sebanyak 44 keluarga ( 66 persen), sebagian kecil 4



keluarga dengan menjual harta atau aset yang dimiliki dan dengan cara lainnya sebanyak 19 keluarga ( 28 persen).

**Table 12. Cara pemenuhan kebutuhan**

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
Meminjam	44
Menjual Aset	4
Lainnya	19
	67



**Gambar 15. Persentase cara pemenuhan kebutuhan**

## **C. INFORMASI PROGRAM BIDIKMISI**

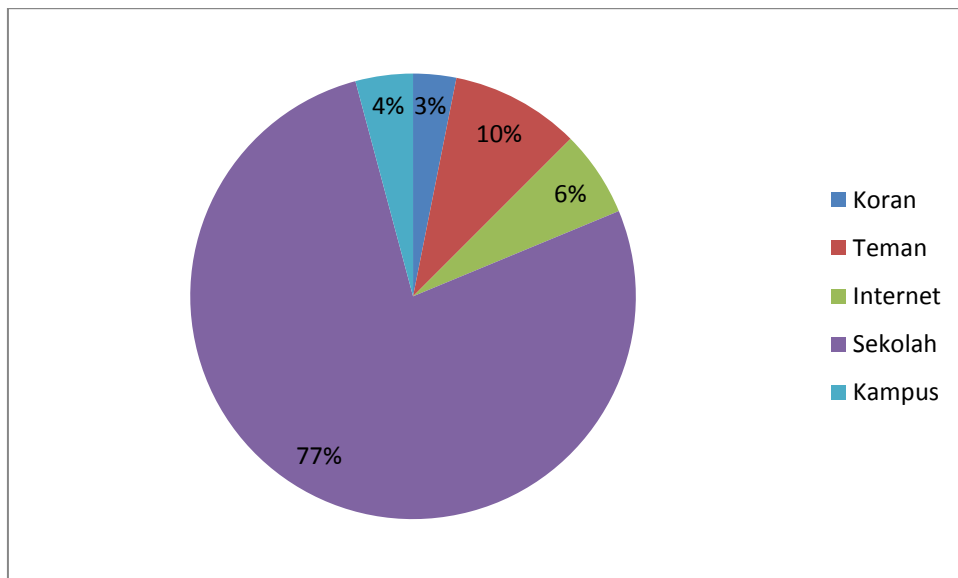
### **1. Informasi mengenai Bidikmisi**

Informasi mengenai bidikmisi memiliki peran yang penting dalam aksesabilitas semua penduduk terhadap program bidikmisi. Sebagian besar responden memperoleh informasi mengenai bidikmisi dari sekolah yaitu sekitar 74 orang atau 77 persen, sedangkan informasi dari teman mencapai 9 orang (10

persen), internet 6 orang (6 persen), kampus 4 orang (4 persen) dan koran 3 orang (3 persen).

**Tabel 13. Sumber informasi bidikmisi**

Sumber	Jumlah
Koran	3
Teman	9
Internet	6
Sekolah	74
Kampus	4



**Gambar 16. Persentase sumber informasi bidikmisi**

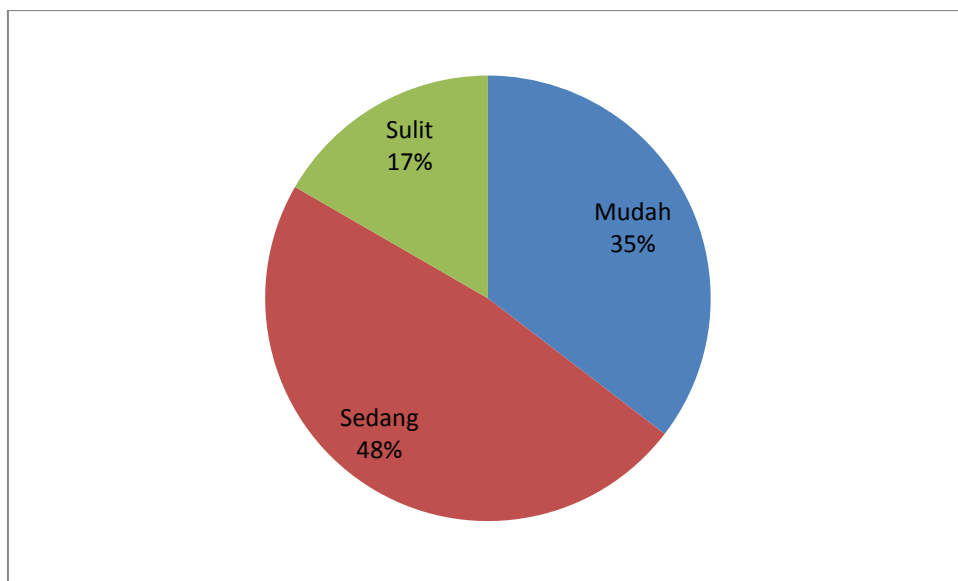
## 2. Proses pengajuan

Mahasiswa bidikmisi mengaku memperoleh kemudahan dalam proses pengajuannya mencapai 34 orang atau 48 persen, 46 orang mengatakan sedang atau 35 persen dan 16 orang (17 persen) mengatakan sulit. Kemudahan atau kesulitan dalam proses pengajuan sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan dukungan sekolah calon mahasiswa yang bersangkutan. Ketiadaan informasi yang memadai

pada tingkat sekolah mengharuskan calon mahasiswa untuk mencari informasi sendiri.

**Tabel 14. Proses pengajuan**

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
Mudah	34
Sedang	46
Sulit	16



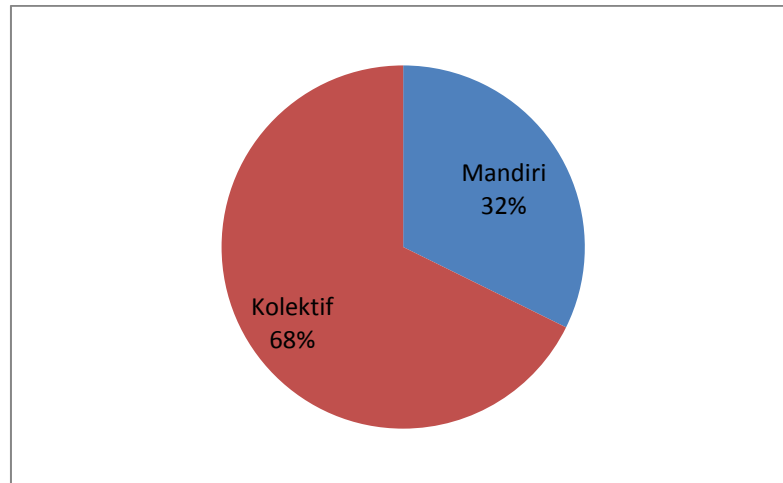
**Gambar 17. Persentase proses pengajuan**

### **3. Cara Pengajuan**

Beberapa calon mahasiswa mengajukan beasiswa bidikmisi secara mandiri atau individual mencapai 31 orang atau 32 persen, dan sisanya 65 orang atau 68 persen dengan cara kolektif yang dikoordinir oleh sekolah. Pengajuan secara mandiri inilah yang bagi sebagian mahasiswa terasa menyulitkan.

**Table 15. Cara pengajuan**

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
Mandiri	31
Kolektif	65
	96



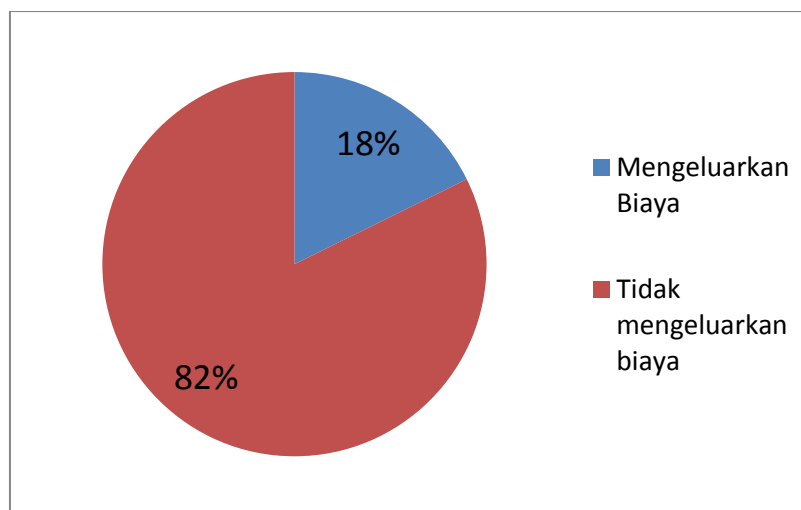
**Gambar 18. Persentase Cara pengajuan**

#### **4. Biaya Pengurusan**

Biaya pengurusan yang dimaksud adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh calon mahasiswa yang berkaitan dengan administrasi bidikmisi. Sebanyak 17 responde (18 persen) mengeluarkan biaya dan 79 responden tidak mengeluarkan biaya (82 persen).

**Tabel 16. Biaya pengurusan**

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
Mengeluarkan Biaya	17
Tidak mengeluarkan biaya	79



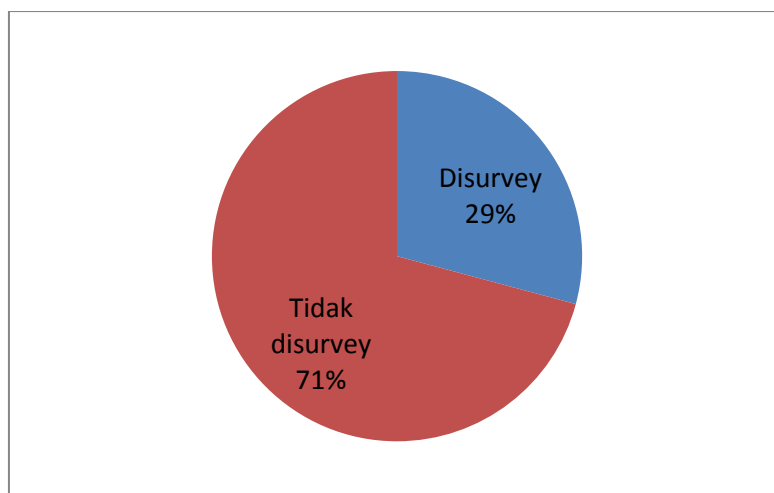
**Gambar 19. Persentase Biaya pengurusan**

## 5. Survey Tempat tinggal

Survey tempat tinggal (rumah) calon mahasiswa dilakukan oleh perguruan tinggi untuk menentukan kelayakan penerima. Proses tersebut perlu dilakukan untuk mengkonfirmasi data yang diberikan oleh calon mahasiswa. Ada kesan untuk memperoleh beasiswa bidikmisi calon mahasiswa memberikan data yang tidak valid dalam formulirnya. Dari data yang diperoleh, sebanyak 68 mahasiswa tidak disurvei terlebih dahulu atau mencapai 71 persen dan hanya 38 mahasiswa atau 29 persen saja yang disurvei. Hal ini tentunya dapat mengakibatkan tidak tepatnya sasaran. Perguruan tinggi tidak melakukan survey karena membutuhkan biaya yang tidak sedikit terutama untuk survey tempat tinggal calon mahasiswa yang berasal dari luar provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

**Table 17. survey tempat tinggal**

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
Disurvei	28
Tidak disurvei	68



**Gambar 20. Persentase survey tempat tinggal**

#### **D. DESKRIPSI PEMANFAATAN BANTUAN**

Ketepatan sasaran di tingkat mahasiswa menunjukkan hasil yang bervariasi, bahkan di dalam satu perguruan tinggi yang sama. Gambaran tingkat ketepatan sasaran di tingkat rumah tangga (mahasiswa) tersebut diperoleh dengan melakukan suatu analisis pembagian manfaat (*benefit incidence analysis*) sederhana antara tingkat kesejahteraan rumah tangga hasil pendataan bidikmisi yang dilakukan perguruan tinggi dengan data penerima bidikmisi untuk mahasiswa yang dijadikan responden.

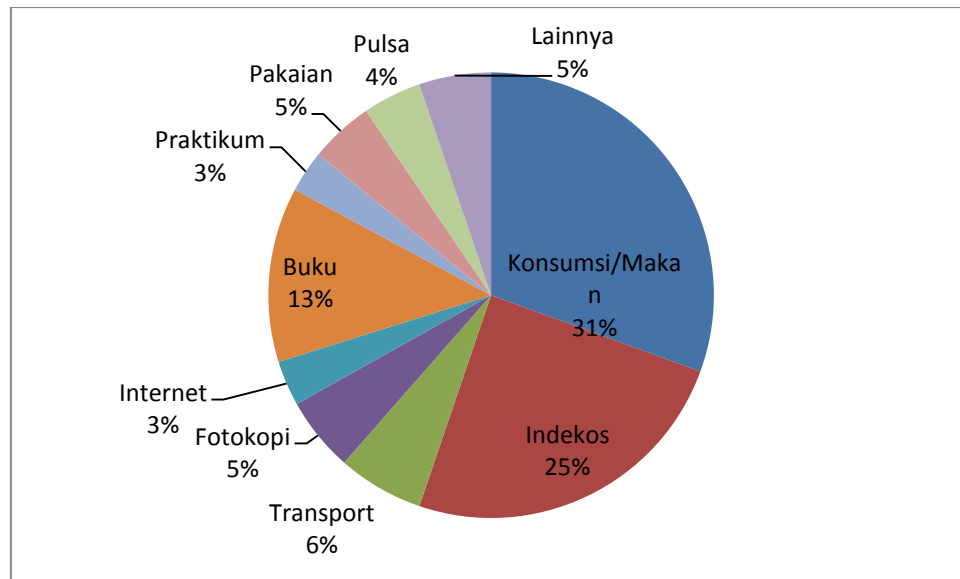
Setiap bulannya mahasiswa bidikmisi memperoleh tunjangan biaya hidup Rp 600.000 atau sesuai dengan ketentuan pemerintah yang dibayarkan sesuai dengan kebijakan perguruan tinggi masing-masing, ada yang setiap satu bulan (27), tiga bulan (44) dan enam bulan (28). Dalam penyalurannya sebanyak 86 responden menyatakan pernah terjadi keterlambatan dari jadwal semula dan hanya 10 responden yang menyatakan penyaluran sesuai dengan jadwal tidak pernah terlambat.

## 1. Alokasi pemanfaatan bantuan biaya hidup Bidikmisi

**Tabel 18. Alokasi pemanfaatan Bidikmisi**

No.	Komponen Biaya	Jumlah
1	Konsumsi/Makan	269.135
2	Indekos	217.114
3	Transport	54.969
4	Fotokopi	47.656
5	Internet	28.969
6	Buku	111.719
7	Praktikum	26.719
8	Pakaian	40.729
9	Pulsa	37.500
10	Lainnya	46.052
		863.819

Dalam tabel diatas, komponen pengeluaran dikelompokkan menjadi 10 berdasarkan biaya kebutuhan yang sering dikeluarkan oleh mahasiswa. Alokasi paling besar digunakan untuk konsumsi/makan sebesar Rp.269.135 setiap bulannya atau 31 persen dari total biaya hidup. Alokasi paling besar berikutnya adalah kos, sebesar Rp. 217,114 setiap bulannya atau 25 persen. Dari kedua komponen biaya saja sudah mencapai lebih dari 50 persen. Sisa bantuan 44 persen baru digunakan untuk kebutuhan lainnya.



**Gambar 21. Persentase alokasi pemanfaatan Bidikmisi**

Secara rata-rata, kebutuhan biaya hidup lebih tinggi daripada bantuan bidikmisi yaitu sekitar Rp. 263.819 setiap bulannya. Jumlah inilah yang masih harus ditanggung oleh orangtua mahasiswa. Dari data yang diperoleh sebagian besar mahasiswa yaitu 59 orang masih diberikan tambahan kiriman atau uang dari keluarganya dan hanya 37 yang tidak meminta lagi biaya dari keluarganya.

Disaat yang lainnya, terdapat mahasiswa yang menyisihkan sebagian bantuan biaya hidup guna memberikan kepada orangtuanya sebesar Rp. 119.568 setiap bulannya.

## 2. Tempat Tinggal di Yogyakarta

Jarak antara asal tempat tinggal (rumah) dengan Kota Yogyakarta menentukan jenis tempat tinggal selama kuliah di Yogyakarta. Tempat tinggal ini juga akan berkaitan dengan moda transportasi yang digunakan.

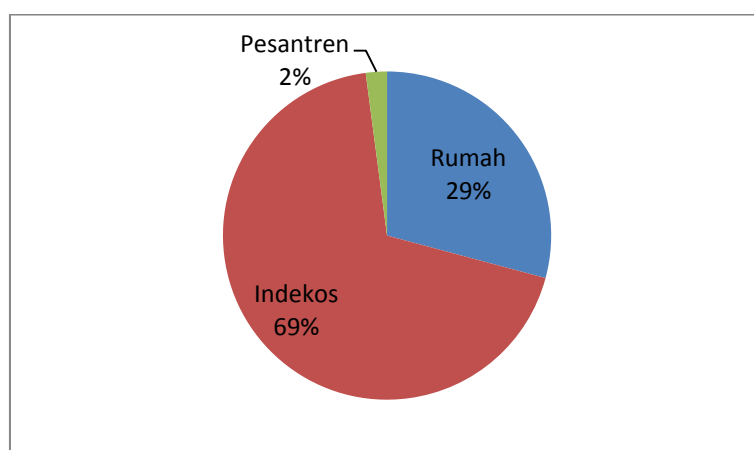
**Tabel 19. Tempat Tinggal di Yogyakarta**

Tempat Tinggal	Jumlah
Rumah	28



Indekos	66
Pesantren	2

Sebagian besar responden bidikmisi berasal dari luar kota Yogyakarta, atau cukup jauh dari kampus sehingga mereka harus indekos disekitar kampus. Sebanyak 66 responden indekos (69 persen) dengan biaya sewa per bulan mencapai Rp. 217.114. Sebanyak 28 mahasiswa atau 29 persen masih bertempat tinggal di rumah orangtua artinya mereka pulang pergi ke kampus dari rumah dan sebagian kecil 2 responden (2 persen) tinggal di pesantren.



**Gambar 22. Persentase tempat tinggal di Yogyakarta**

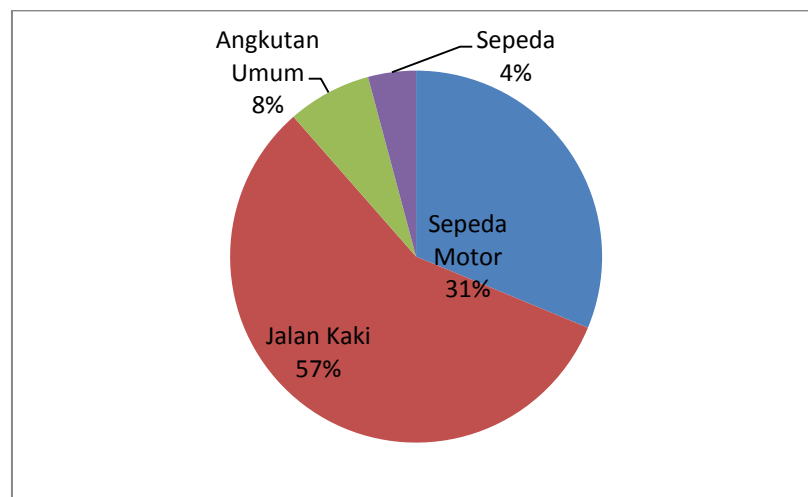
### 3. Moda Transportasi ke Kampus

Jarak asal tempat tinggal dan tempat tinggal di Yogyakarta akan mempengaruhi moda transportasi yang digunakan dan biaya yang timbul adanya.

**Tabel 20. Moda transportasi ke kampus**

Moda Transportasi	Jumlah
Sepeda Motor	30
Jalan Kaki	55
Angkutan Umum	7
Sepeda	4
	96

Secara rata-rata jarak dari tempat tinggal ke kampus adalah 6 km. dari data tempat tinggal dan moda transportasi dapat disimpulkan, banyaknya mahasiswa yang menggunakan sepeda motor sebanyak 30 orang atau 31 persen karena berangkat dari rumah yang cukup jauh untuk sampai di kampus. Mereka yang tinggal di kos kebanyakan berjalan kaki mencapai 55 orang atau 57 persen . Karena jarak yang cukup jauh dan memakai sepeda motor maka alokasi biaya untuk transportasi juga cukup tinggi yaitu Rp. 54.969 per bulan. Masih terdapat juga responden yang menggunakan angkutan umum sebanyak 7 responden atau 8 persen dan 4 orang yang menggunakan sepeda atau sekitar 4 persen. Perbedaan dalam asal tempat tinggal, tempat tinggal di Yogyakarta dan moda transportasi yang digunakan menyebabkan alokasi dana bantuan bidikmisi juga berbeda-beda. Apabila berjalan kaki, maka biaya kos menjadi lebih besar dibandingkan dengan berangkat dari rumah alokasinya lebih besar untuk biaya transportasi. Oleh karena itu ketepatan sasaran responden dan pemanfaatan dana juga banyak dipengaruhi oleh penggunaan dan alokasinya tidak hanya pada faktor ekonomi oragtua calon mahasiswa.



**Gambar 23. Moda transportasi ke kampus**

## E. BENEFIT INCIDENCE ANALYSIS

Pada sub bab ini akan diuraikan analisis distribusi manfaat beasiswa bidikmisi mahasiswa di Provinsi DIY pada tiap kelompok pendapatan. Analisis ini dimulai dari penghitungan pendapatan dan belanja rata-rata keluarga mahasiswa bidikmisi. Belanja dan pendapatan tersebut selanjutnya didistribusikan menurut jumlah keluarga tiap keluarga yang terdapat pada masing-masing kelompok pendapatan. Hasil atau manfaat yang diterima tiap kelompok pendapatan kemudian dibandingkan untuk mengetahui apakah manfaat belanja pendidikan sudah tepat sasaran atau belum, yakni kelompok termiskin menerima sebagian besar dari alokasi bidikmisi. Penilaian tersebut akan diperbandingkan dengan penghitungan distribusi manfaat marginal yang diterima masing-masing kelompok pendapatan dan dilengkapi dengan analisis faktor-faktor yang terkait sehingga penelitian ini dapat memberikan pemahaman kenapa distribusi belanja pendidikan tersebut sudah atau belum sesuai dengan tujuannya dari fungsi belanja pendidikan yakni distribusi pendapatan.

Dalam penelitian ini pembagian sampel dibagi menjadi 5 grup (*quintile*) berdasarkan tingkat pendapatan masing-masing rumah tangga seperti yang telah disebutkan pada bab 3. Pembagian sampel tersebut dapat menunjukkan kelompok masyarakat seperti apa yang paling banyak menikmati dana subsidi dari Program Bidikmisi. Rincian perhitungan *Benefit Incidence Analysis* terhadap Program Bidikmisi penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

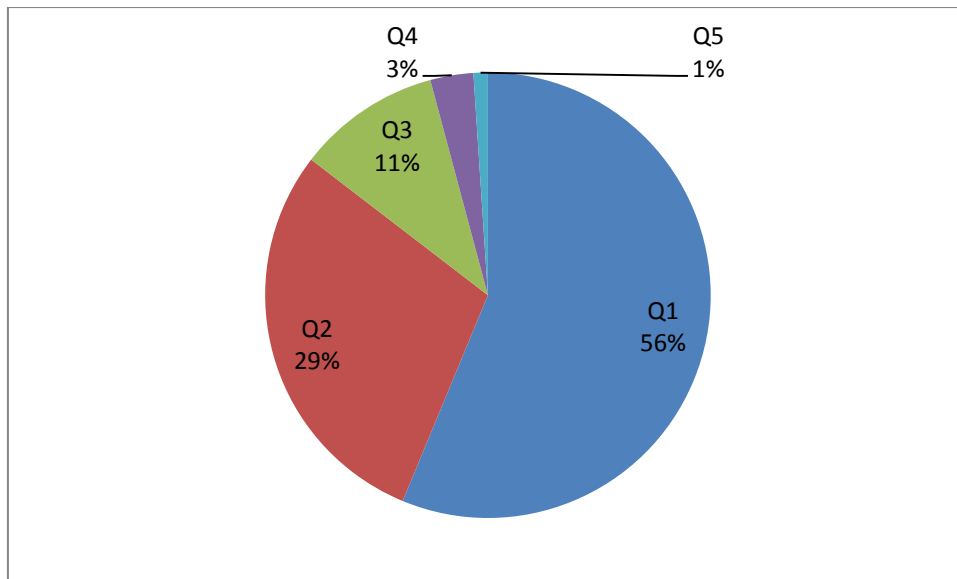
**Tabel 21. Kuintil Benefit Incidence**

<b>Kuintil</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Kumulatif</b>
Q1	54	54
Q2	28	82
Q3	10	92

Q4	3	95
Q5	1	96
	96	

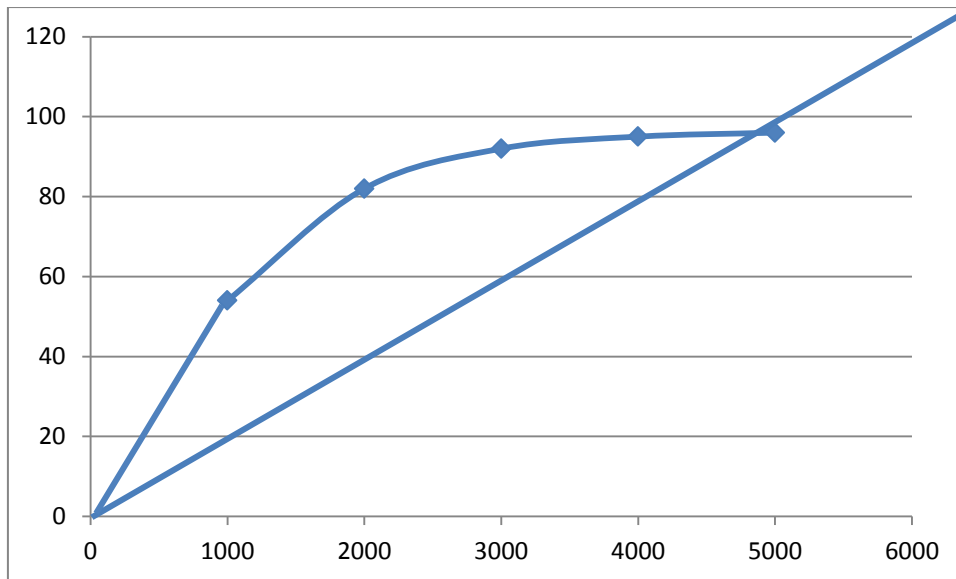
Dari tabel kuintil orangtua mahasiswa, 54 keluarga atau sekitar 56 persen merupakan rumah tangga dengan pendapatan kurang dari Rp.1.000.000 per bulan. Dilihat dari pembagian manfaat bidikmisi, golongan masyarakat dengan penghasilan rendah memperoleh bagian yang lebih besar daripada golongan masyarakat yang lebih tinggi pendapatannya. Dengan demikian, program bidikmisi pemerintah berhasil meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi. Golongan masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak sanggup membiayai sendiri pendidikan tinggi menerima manfaat yang tinggi. Apabila diteliti, dari responden yang dijadikan sampel lebih dari 50 persen berasal dari keluarga tidak mampu dengan pendapatan kurang dari Rp. 2.000.000 perbulan yang merupakan gabungan pendapatan kedua orangtuanya. Distribusi kumulatif dua kuintil, pertama (Q1) dan kedua (Q2) mencapai 82 persen menunjukkan golongan masyarakat berpendapatan paling rendah memperoleh pembagian manfaat (benefit incidence) paling banyak dari subsidi pendidikan yang dikeluarkan pemerintah. Adapun golongan masyarakat dengan pendapatan tinggi pada kuintil lima (Q5) hanya memperoleh 1 persen manfaat saja. Artinya golongan masyarakat kaya memperoleh alokasi subsidi pendidikan tinggi yang lebih kecil dari seluruh golongan masyarakat.

Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat adalah aksesabilitas golongan rendah terhadap pendidikan tinggi. Orangtua hanya memberikan tambahan biaya sewaktu-waktu ketika diperlukan. Bantuan biaya hidup sebesar Rp.600.000 sudah cukup apabila dapat mengaturnya dengan baik.



**Gambar 24. Kuintil Pendapatan Orangtua**

Progresivitas Program Bidikmisi dapat diketahui dengan Kurva konsentrasi yang terbentuk dari hasil perhitungan *Benefit Incidence Analysis*. Kurva tersebut merupakan gambaran dari distribusi kumulatif pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan khususnya pada subsidi Bidikmisi yang dihubungkan dengan distribusi kumulatif responden. Rincian kurva tersebut dapat dilihat dalam gambar 25. Pada gambar tersebut, progresivitas Program Bidikmisi ditunjukkan dengan kurva konsentrasi yang berwarna biru yang dibandingkan dengan garis diagonal 45 derajat sebagai batas kesetaraan yang sempurna. Kebijakan bidikmisi juga dapat dikatakan sebagai kebijakan yang *propoor* karena manfaat lebih banyak dirasakan oleh masyarakat golongan rendah.



**Gambar 25. Kurva Lorenz Bidikmisi**

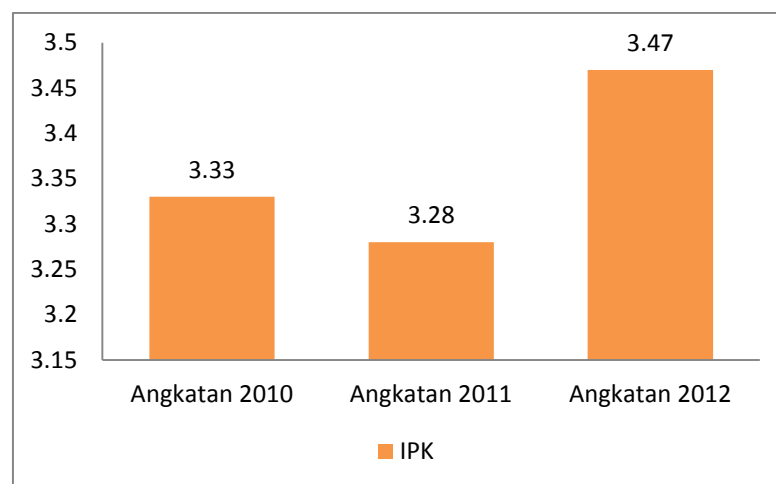
#### **F. KINERJA AKADEMIK**

Salah satu keberhasilan pembelajaran adalah tercapainya standar kelulusan dengan baik. Standar tersebut adalah selesai tepat waktu dengan nilai yang baik. Disamping itu prestasi dan kinerja lainnya dapat dilihat dari aktivitas ekstrakurikuler atau di Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Dari data mahasiswa yang dijadikan responden, sebanyak 82 responden mahasiswa aktif dalam berbagai kegiatan kampus seperti BEM, HIMA, UKM, KOPMA, LDF, Mapala, dan lain-lain dan hanya 14 yang tidak mengikuti kegiatan kemahasiswaan. Bahkan 21 mahasiswa pernah memperoleh penghargaan dalam berbagai bidang. Kegiatan tersebut nantinya akan menjadi nilai tambah bagi lulusan mahasiswa bidikmisi ketika memasuki dunia kerja atau wirausaha.

**Tabel 22. Jumlah SKS yang ditempuh**

<b>Angkatan</b>	<b>SKS</b>
2010	124
2011	88
2012	46

Dari mahasiswa ketiga angkatan, secara rata-rata telah menempuh mata kuliah yang diwajibkan. Untuk mahasiswa angkatan 2010 atau semester 6, telah menempuh 124 SKS atau sekitar 21 SKS per semester dengan nilai IPK mencapai 3,33. Sedangkan mahasiswa angkatan 2011 atau semester 4 telah menempuh 88 SKS atau 22 SKS per semester dengan nilai IPK mencapai 3,28. Dan mahasiswa angkatan 2012 telah menempuh 46 SKS atau 23 SKS setiap semester dengan nilai yang sudah diraih 3,47. Prestasi akademik tersebut cukup baik IP diatas 3 pada skala 4, demikian juga mata kuliah yang ditempuh sehingga diharapkan semua mahasiswa bidikmisi dapat menyelesaikan kuliahnya di perguruan tinggi masing-masing tepat waktu sesuai dengan bantuan beasiswa yang diberikan.



**Gambar 26. Indeks Prestasi Kumulatif**

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Penelitian ini memberikan deskripsi program bidikmisi terutama dari sisi penerima yaitu mahasiswa bidikmisi. Program bidikmisi mempunyai ketentuan yang sudah diatur sehingga pengelolaan dan prosedur penyaluran bidikmisi yang terdapat di semua perguruan tinggi pada umumnya sama. Perbedaan hanya terdapat pada kebijakan penentuan penerimanya saja.

Oleh karena itu, penelitian ini lebih banyak menekankan pada sisi masyarakat (orangtua) mahasiswa penerima bidikmisi. Apakah program tersebut sudah tepat sasaran. Dari paparan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyaluran program bidikmisi sudah ditentukan alokasinya oleh kementerian pendidikan pusat, perguruan tinggi bertanggung jawab untuk menyalurkannya kepada kelompok masyarakat (calon mahasiswa) yang sesuai dengan ketentuan yang diatur. Bantuan sebesar Rp.1.000.000 dibagi menjadi 2 yaitu biaya pendidikan yang langsung diterima perguruan tinggi dan bantuan biaya hidup. Biaya pengelolaan oleh perguruan tinggi sebesar Rp.400.000 perbulan dan bantuan biaya hidup Rp.600.000 perbulan. Bantuan diberikan setiap bulan atau tidak tergantung dari perguruan tinggi masing-masing.
2. Dari analisis pembagian manfaat, kelompok masyarakat dengan penghasilan paling rendah pada kuintil satu (Q1) memperoleh 56 persen dan kuintil dua (Q2) memperoleh 29 persen. Kedua golongan masyarakat tersebut mempunyai penghasilan terendah kurang dari Rp.2.000.000 perbulan. Dari kurva Lorenz dapat



dilihat garis berwarna biru yang merupakan representasi program bidikmisi berada di atas garis diagonal (kurva konsentrasi) sehingga program bidikmisi dapat dikatakan sebagai kebijakan yang progresif karena masyarakat golongan pendapatan rendah memperoleh manfaat paling besar.

3. Pemerintah perlu untuk memetakan program bidikmisi berdasarkan lokasi perguruan tinggi, hal tersebut untuk memastikan bahwa masyarakat yang menerima memang benar yang membutuhkan melalui survey (visitasi) tempat tinggal. Perguruan tinggi dapat mengelola bantuan dengan baik dan tidak ada keterlambatan dalam penyalurannya. Akan lebih baik apabila mahasiswa bidikmisi dapat diatur dan ditata mengenai tempat tinggal (dormitory) agar prestasi dan bantuan biaya hidup dapat maksimal manfaatnya. Masyarakat lebih proaktif dalam mencari informasi berkaitan dengan subsidi pendidikan sehingga aksesibilitas dalam angka partisipasi pendidikan khususnya pendidikan tinggi semakin besar.

## **B. SARAN-SARAN**

1. Pemerintah sebaiknya selalu menyediakan subsidi biaya pendidikan melalui program bidikmisi dan meningkatkan cakupan dan sasaran penerimanya. Pelibatan lebih banyak calon mahasiswa dan perguruan tinggi akan semakin meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi masyarakat.
2. tata kelola dan prosedur program bidikmisi sebaiknya diperbaharui dengan mengevaluasi pelaksanaan program yang telah berjalan, seperti pemanfaatan dana bantuan yang banyak terserap untuk kos dan konsumsi. Sebaiknya mahasiswa penerima subsidi pendidikan lebih dikelola dengan menyediakan asrama sehingga lebih terkontrol baik akademik maupun perilakunya.

3. masyarakat dapat memanfaatkan bantuan pemerintah dengan mendorong agar anaknya serius dan mencapai prestasi maksimal dalam pendidikannya. Pandapatan yang seharusnya untuk membiayai kuliah dapat dialokasikan pada kegiatan yang lebih membutuhkan dan bermanfaat.

## DAFTAR PUSTAKA

Cuenca, Janet S, 2008, *Benefit Incidence Analysis Of Public Spending On Education In The Philippines: A Methodological Note*, Philippine Institute For Development Studies.

Dayan, Anto. 1986. *Pengantar Metode Statistik*. Jilid 2. Jakarta:LP3ES

Demery, Lionel, 2000, *A Practitioner's Guide*, Poverty and Social Development Group Africa Region, The World Bank.

Dabla-Norris, Era and Gradstein, Mark, 2004, *The Distributional Bias of Public Education: Causes and Consequences*, IMF Working Paper, IMF Institute

Hadi, Sutrisno. 2000. *Metodologi Research*. Yogyakarta : Andi Yogyakarta

Musgrave, Richard A Musgrave, Peggy B. 1989, *Public Finance in Theory and Practise*. Mc Graw Hill.

Mangkusubroto, Guritno, 1995, *Ekonomi Publik*, Penerbit BPFY Yogyakarta.

Michael P *Todaro*, Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga, Edisi Keenam, Jakarta, Gramedia, 2003

Suparmoko, 1999. *Metode Penelitian Praktis : Untuk Ilmu-Ilmu Sosial, Ekonomi dan Bisnis*. BPFY Yogyakarta

Nazir. Moh D, 2005, *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Bogor

Supranto, J. 2004. *Analisis Multivariat Arti dan Interpretasi*. Jakarta: Rnieka Cipta.

Samuelson. Paul. A. dan Nordhaus. William D, 1997, *Makro Ekonomi*, Jakarta: Erlangga

## LAMPIRAN